

TERJEMAHAN JURNAL

**QARD AL-HASSAN AS A TOOL FOR POVERTY
ALLEVIATION: A CASE STUDY OF THE FAEL KHAIR WAQF
PROGRAM IN BANGLADESH**



Disusun Oleh :

**MARTHA PURNA SYIVA
NIM. 160603148**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Martha Purna Syiva

NIM : 160603148

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam terjemahan jurnal ini saya

1. *Menterjemahkan jurnal ini dengan kemampuan saya sendiri.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2021

g menyatakan,



Martha Purna Syiva

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TERJEMAHAN JURNAL

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Qard Al-Hassan As A Tool For Poverty Alleviation:
A Case Study Of The Fael Waqf Program
In Bangladesh**

Disusun Oleh:

Martha Purna Syiva
NIM. 160603148

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197209072000031001

Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak.CA., CPA
NIPN. 2024026901.

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hashmita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG TERJEMAHAN JURNAL

Martha Purna Syiva

NIM. 160603087

Dengan Judul:

QARD AL-HASSAN AS A TOOL FOR POVERTY ALLEVIATION: A CASE STUDY OF THE FAEL KHAIR WAQF PROGRAM IN BANGLADESH

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 27 Agustus 2020 M
7 Muharram 1442 H

Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197209072000031001

Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak.CA., CPA
NIDN. 2024026901.

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

Riza Aulia, S.E.I., M.Sc
NIP. 198801302018031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. AgK
NIP. 196403141992031003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Martha Purna Syiva

NIM : 160603148

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : marthapurnasyiva@mail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

**QARD AL-HASSAN AS A TOOL FOR POVERTY ALLEVIATION: A CASE
STUDY OF THE FAEL KHAIR WAQF PROGRAM IN BANGLADESH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 27 Agustus 2020

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Martha Purna Syiva
NIM. 160603148

Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.
NIP. 197209072000031001

Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak.CA., CPA
NIPN. 2024026901

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Dengan menyebut nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyanggah”*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang ku sanyangi ialah
kedua orang tua ku, Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta yang
selalu memberikan harapan yang baik disetiap langkah dalam
menuntut ilmu serta selalu memberikan support, semangat,
dukungan hingga sampai pada hari ini.*

*Untuk orang-orang yang seperjuangan dengan saya, dan untuk
seluruh kerabat dekat, sahabat, teman yang akan menjadi
generasi penerus kedepannya.*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturannya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan terjemahan jurnal dengan judul “Qard Al-Hassan As A Tool For Poverty Alleviation: A Case Study Of The Fael Khair Waqf Program In Bangladesh” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam saya limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag., dan Ayumiati, S.E., M.Si. sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Muhammad Arifin, Ph.D. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc. dan Evy Iskandar,SE.,M.Si.,Ak,CA.,CPA. sebagai dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis selama dalam waktu bimbingan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag, dan Riza Aulia, S.E.I., M.Sc sebagai dosen penguji I dan penguji II dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan serta kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Muhammad Arifin, Ph.D. sebagai Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-Dosen program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Farah Muneer dan Foyasal Khan sebagai pemilik jurnal yang kami terjemahkan.
8. Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda atas segala cinta, kasih sayang, doa, bimbingan, dukungan, dan nasehat yang luar biasa tiada hentinya. Kakak Rusmahini terima kasih juga telah membantu dalam membiayai

kuliah saya, kakak Miftahul Jannah terima kasih juga telah memberikan harapan, semangat, dukungan yang tiada henti hingga saat ini, kakak Iffah Fadhilah, kakak uswatun Hasanah, dan abang Fayassar terima kasih juga telah memberikan yang terbaik kepada saya selama saya masuk diperkuliahan, dan adik bungsu saya Rahmat Fadhil terima kasih juga telah membantu dalam menyemangati, menghibur, lebih kurang empat tahun.

9. Sahabat dalam keadaan susah maupun senang selama diperkuliahan seluruh tim wanita sholehah. sebagai sahabat terbaik tempat sandaran dalam menuangkan segala hal, susah maupun senang selama empat tahun Mauriska Amalia, Feni Rima Wati, Sonia Ayesha Riska, Zalifah, Tiara,
10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 18 Agustus 2020
Penulis,

Martha Purna Syiva

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Martha Purna Syiva
NIM : 160603148
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Qard Al-Hassan As A Tool For Poverty Alleviation: A Case Study Of Fael Khair Waqf Program In Bangladesh
Tgl Sidang : 27 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 136 Halaman
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.
Pembimbing II : Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak, CA., CPA.

Fokus utama dari sistem ekonomi Islam adalah berpacu pada keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama di bagian paling bawah lapisan dasar piramida. Qard-al-Hassan, beserta zakat dan sedekah, adalah salah satu layanan untuk redistribusi pendapatan dan kekayaan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu dalam Islam. Pada tahun 2007, Bangladesh dilanda angin topan SIDR yang sangat dahsyat serta menewaskan sebanyak 3.406 orang. Selain itu, musibah SIDR mengakibatkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti rumah, tanaman, dan mata pencaharian. Berdirinya program Fael Khair Waqf (FKW) adalah sebagai sarana bantuan cepat tanggap terhadap kebutuhan mendesak untuk membantu para korban topan dan memprakarsai skema pinjaman mikro bebas bunga (Qard-al-Hassan) dengan tujuan untuk memulihkan mata pencaharian dari sebagian besar korban serta untuk membantu mereka keluar dari zona kemiskinan. Disamping ingin melihat keefektifitas Qard-al-Hassan dalam mengatasi angka kemiskinan, penelitian ini juga mengkaji program FKW sebagai studi kasus. Analisis dilakukan terhadap 1600 keluarga (rumah tangga) dengan menggunakan uji-t sampel independen dan regresi logistik untuk melihat sejauh mana keefektifan program dalam mengurangi angka kemiskinan. Hasil dari analisis logistik ditemukan bahwa orang yang masuk dalam kategori miskin dan kemungkinan besar menjadi peserta FKW adalah sekitar 1,46 kali lebih rendah dari pada non-peserta. Selain itu, layanan Qard-al-Hassan juga

meringankan biaya pinjaman secara signifikan dan karenanya para peserta dapat mengakumulasi lebih banyak aset, yang mana mungkin dapat membantu mereka dalam meningkatkan status ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa efektifnya suatu program dapat dicapai dari kerjasama antara praktisi pembangunan dan juga peneliti dalam mempromosikan dan memperkenalkan sarana Qard-al-Hassan, sehingga kaum fakir miskin dapat dengan mudah memanfaatkan jasa tersebut.

Kata kunci: Qard-al-Hassan; Pengentasan Kemiskinan, program Fael Khair Waqf (FKW); Biaya Metode Kebutuhan Dasar (CBN); Analisis logistik



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERS EMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I QARD-AL-HASSAN AS A TOOL FOR POVERTY ALLEVIATION: A CASE STUDY OF THE FAEL KHAIR WAQF PROGRAM IN BANGLADESH	 1
I. INTRODUCTION..	1
II. LITERATURE REVIEW.....	8
III. METHODOLOGY.....	18
IV. RESULTS AND ANALYSIS.....	25
V. CONCLUSION AND RECOMMENDATION	41
VI. REFERENCE.....	43
 BAB QARD-AL-HASSAN SEBAGAI LAYANAN KEUANGAN ISLAM DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN: STUDI KASUS PROGRAM WAQAF FAEL KHAIR DI BANGLADESH.....	 47
I. PENDAHULUAN.....	47
II. TINJAUAN LITERATUR... ..	54
III. METODOLOGI.....	65
IV. HASIL DAN ANALISA	73

V. KESIMPULAN DAN SARAN	89
VI. DAFTAR PUSTAKA.....	94
BAB III RIVIEW JURNAL.....	.98



BAB I

QARD-AL-HASSAN AS A TOOL FOR POVERTY ALLEVIATION: A CASE STUDY OF THE FAEL KHAIR WAQF PROGRAM IN BANGLADESH

Farah Muneer¹ and Foyasal Khan²

1 Institute for Inclusive Finance and Development (InM),
Bangladesh, muneerfarah@gmail.com

2 Department of Economics, International Islamic University
Malaysia (IIUM), Malaysia, foyasal.khan@gmail.com

ABSTRACT

The central focus of the Islamic economic system is on socioeconomic justice and the overall welfare of society, especially at the bottom of the pyramid segment. Qard-al- Hassan, alongside zakat and sadaqah, is one of the instruments for the redistribution of income and wealth from the rich to the poor in Islam. In 2007, Bangladesh was struck by super cyclone SIDR, leaving 3,406 people dead. Moreover, SIDR caused unprecedented damage to homes, crops and livelihoods. The Fael Khair Waqf

(FKW) Program came as a response to the urgent need to assist the victims of the cyclone and initiated an interest-free micro-loan (Qard-al-Hassan) scheme to restore the livelihoods of a large segment of the victims and to lift them out of poverty. While investigating the effectiveness of Qard-al-Hassan in poverty reduction, this paper also examines the FKW program as a case study. Analysis was conducted of 1600 households using an independent sample t-test and logistic regression to investigate to what extent the program has been effective in reducing poverty. The findings of the logistic analysis are that the probability of being poor for FKW participants is around 1.46 times lower than for non-participants. Moreover, the Qard-al-Hassan of FKW lowers the cost of borrowing significantly and hence participants can accumulate more assets, which might help them to improve their economic status. Overall, the effectiveness of the program implies that development practitioners and researchers should promote the outreach of Qard-al-Hassan so that the extreme poor can easily avail themselves of the services.

Keywords: Qard-al-Hassan; Poverty Alleviation, Fael Khair Waqf (FKW) program; Cost of

Basic Needs (CBN) method; Logistic analysis

JEL Classification: D31; G21; I32.

Article history :

Received : September 16, 2019

Revised : October 8, 2019
Accepted : December 23, 2019
Available online : December 27, 2019

<https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1100>

Acknowledgements: The authors are grateful to the Islamic Development Bank for entrusting InM to evaluate the Fael Khair Waqf program in Bangladesh. The study is based on the data collected during the evaluation period.



I. INTRODUCTION

1.1. Background

The inclusive well-being of any society can be improved if economic and social justice for all is ensured in the true sense of the term, which is something the Islamic economic system focuses on centrally. In the Islamic system, individuals can pursue their personal interests within the broader realm of societal interest. That is why morally guided individuals are ready to sacrifice their own personal interests if they are not in line with collective ones. Production, consumption, distribution and redistribution are the basic features of any economic system, which has its own distinct related philosophical views, institutions and instruments. There are a number of social financial institutions and instruments within Islam which centre on the principles of mutual co-operation (al-taawoun), risk-sharing (al-musharakat fi al-makhatir) and social justice (al-adalah al-ijtimayyiah). Among others, zakat, sadqah, waqf and Qard-al-Hassan are some of the classical instruments of Islam that support the creation of a society where wealth is redistributed from the rich few to the many poor people. In this way, Islamic economic instruments can be effective in achieving sustainable development, including the alleviation of all forms of poverty (Iqbal & Shafiq, 2015; Mohiieldin, Iqbal, Rostom, & Fu, 2011).

Financial inclusion in the form of enhancing access to financing for people of all walks of life is key to ending poverty

(Mohieldin et al., 2011). The glorious history of Islamic civilization bears testimony to the fact that Islamic institutions such as zakat, waqf and Qard al-Hassan have played a key role in creating a caring society, in which the basic needs of everyone are met (Zarqa, 1988; Siddiqi, 2004, in Aslam Haneef et al., 2015). The practice of Qard al-Hassan has been encouraged based on the principles of mutual co-operation and brotherhood, with rich people providing loans without charging any interest to low income groups and thus contributing to lessening the gap between rich and poor in society (Mojtahed & Hassanzadeh, 2009). At present, the Islamic banking system is able to create an enabling environment for the development of poverty alleviation programs based on Qard-al-Hassan and can thus enhance financial inclusion in Bangladesh. For example, micro-credit programs can be offered through Qard-al-Hassan to redistribute income among the community.

Bangladesh is prone to recurrent disasters, especially in the south-western regions of the country. During the past eight years, three cyclones have affected these areas. The most devastating one was SIDR; millions of people were affected in 12 districts¹, namely Bagerhat, Khulna, Satkhira, Jhalokathi, Pirojpur,

1 The eight divisions of Bangladesh are divided into 64 districts (local government administrative units)

Barisal, Patuakhali, Barguna, Bhola, Gopalganj, Shariatpur and Madaripur. Both physical and non-physical assets were destroyed and sources of livelihood were also affected. In such a situation, people basically coped with their own savings for survival. But livelihood emerged as a major issue immediately after SIDR. The Islamic Development Bank, with grant of US 130 million from an unknown philanthropist, designed a special program for SIDR-affected households, popularly known as the Fael Khair Waqf (FKW) program. Twelve districts severely affected by SIDR were selected for the implementation of the program, with two components – livelihood and the construction of shelter-cum-school houses. The program was basically an Islamic finance model based on a microfinance program with interest free loans, or Qard al-Hassan.

In Abhijit et al.'s book *Poor Economics*, they argue that inadequate understanding of poverty is the main reason for the failure of the majority of anti-poverty policies. To build a world without poverty, researchers should have a willingness to learn from evidence (Banerjee & Duflo, 2011). The Fael Khair Waqf (FKW) program has brought about an opportunity for us to understand how effective Qard al-Hassan could be as an instrument of poverty alleviation in the form of a field experiment.

1.2. Objective

In general, the paper discusses the role of Qard al-Hassan in poverty alleviation. In particular, it aims to observe how FKWP has

had an impact on poverty reduction amongst its beneficiaries, SIDR/Aila-affected households. To measure poverty, the study will focus solely on the cost of basic needs (CBN) method. As it is a unidimensional approach, the CBN method relies on only one household indicator, total expenditure, but it is widely used to understand the absolute poverty scenario and to identify the people who are unable to meet their basic human requirements, and thus are living in extreme or life-threatening poverty.

The paper is expected to contribute to the body of knowledge in the experimental area of Islamic economics. Experimental study on the application of Qard al-Hassan in poverty alleviation is new in Bangladesh. To the best of our knowledge, no study has been conducted on this topic in the country. The distinct features of this paper are: i) it deals with a large sample size; ii) it makes a comparison with a separate control group; and iii) it works with a sample that has been trying to cope with severe environmental shock. It also addresses the role of Qard-Al-Hasan not just for poor households, but also extremely vulnerable ones who are trying to cope with the aftermath of a severe disaster which caused catastrophic loss in terms of lives and assets. In this way, the study is unique as it explores areas not yet covered in any experimental studies, and which is the primary motivation for conducting it.

II. LITERATURE REVIEW

2.1. Qard-al-Hassan: Meaning, Definitions and Characteristics

Qard-al-Hassan consists of two key words: Qard means loan, while Hassan means beautiful. Therefore, the literal meaning of Qard-al-Hassan is ‘beautiful loan’. While Abdullah Yusuf Ali (1872-1948) used this meaning in his translation of the Holy Qur’an, Marmaduke Pickthall mentioned two other meanings of Qard-al-Hassan in his *Meanings of the Holy Qur’an*: (a) a goodly loan (see, Al-Qur’an, 2:245; 57:11; 57:18; 73:20), and (b) a kindly loan (see, Al-Qur’an, 5: 12). It is revealed from the verses where Qard-al-Hassan is mentioned that this type of loan is made directly to Allah and not to the recipient. This is probably a reason for mentioning it as a “beautiful loan” (Iqbal & Shafiq, 2015). Qard-al-Hassan is also mentioned as a ‘benevolent loan’ (see Izadyar & Ragnath, 2014; Iqbal & Shafiq, 2015). Ali (1989, p.100) argues that “a beautiful loan” is a metaphor for spending in the cause of Allah. It not only shows a beautiful spirit of self-denial, but also has manifold blessings because Qard al-Hassan is given to Allah, in whose hands are the keys of want or plenty. A person whose goal is to earn the satisfaction of Allah has no reason to turn away from giving Qard-al-Hassan to a deserving candidate. In the case of Qard al-Hassan, the creditor does not expect any return on the principal from this voluntary loan and even does not press the debtor to return it within an exact period of his own free will, although it is a moral obligation for the debtor to

return it (Mohieldin et al., 2011). However, the creditor will waive the demand for payment of the principal if the borrower cannot repay it due to economic hardship, despite his/her best efforts and good intentions (Iqbal & Shafiq, 2015).

A Glossary of Islamic Economic Terms states that Qard al-Hasanah is “An interest- free loan given mainly for welfare purposes. The borrower is only required to pay back the amount borrowed.” In a similar fashion, Umer Chapra (2005) defines Qard-al-Hassan as a loan which is returned at the end of an agreed period without any interest of share in the profit or loss of the borrower. Mohammad Nejatullah Siddiqi states that “Qard-al-Hassan [is] lending with no obligation for the borrower more than returning the principal.” Similarly, Izadyar and Ragnath (2014) explain that “Qard al-hasan is an interest free loan in which only the return of the capital is required during the term of the loan.”

Allah promises multiple returns for Qard-al-Hassan. Unlike zakat and sadaqat, Qard al-Hassan is not a gift, but a loan that has to be repaid. It is an instrument of development to preserve human dignity because only the borrower has the opportunity to determine the term of the loan. Qard al-Hassan is given importance in a number of verses in the Quran (2:245; 57:11 & 18; 64:17). The reward for giving Qard al-Hassan is even higher than that for sadaqah (general charity). The reward for sadaqah is only tenfold, whereas it is eighteen fold for Qard al-Hassan, as reported by the Prophet (Mohieldin et al., 2011).

Generally, sadaqah is given to a person who is unable to repay it, whereas any noble man can receive Qard al-Hassan during times of hardship and pay it back when times are good and he is wealthy. Therefore, the practice of Qard al-Hassan generates a sense of brotherhood and encourages cooperation. Both parties (receiver and giver) enjoy a similar status. However, a borrower must be cordial with regard to repaying his debt.

Allah promises to remit sins and give a place in heaven to any person who lends to him. Allah says, “If ye establish worship and pay the poor due, and believe in my messengers and support them, and lend unto Allah a kindly loan, surely I shall remit your sins, and surely I shall bring you into gardens underneath which rivers flow” (Al-Quran, 5:12). In another verse, Allah says “Recite, then, of the Qur’an that which is easy for you... and establish worship and pay the poor due and (so) lend unto Allah a goodly loan. Whatsoever good ye send before you for your souls, ye will surely find it with Allah, better and greater in the recompense. And seek forgiveness of Allah. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.” Lenders do not expect any monetary reward when giving Qard-al-Hassan. Instead they expect rewards from Allah in this world or hereafter for their acts of benevolence (Iqbal & Shafiq, 2015).

2.2. Qard-al-Hassan: A Tool for Poverty Alleviation and Financial and Social Inclusion

For the purposes of financial inclusion, numerous microcredit institutions are functioning all over the world at formal and informal levels. These institutions are providing small loans to poor people but charging exorbitant interest rates. While there is lack of credible academic evidence on the role of these institutions in poverty alleviation, the suicides of many borrowers in Andhra Pradesh, India have exposed the fragile system of interest-based microcredit programs. In contrast, Qard al-Hassan could be a tool not only for poverty alleviation, but also for financial and social inclusion (Iqbal & Shafiq, 2015; Aslam Haneef et al., 2015). The poor can have easier access to financial services at a reasonably low cost if Qard al-Hassan, alongside waqf and zakat, are effectively practised by Islamic financial institutions (Aslam Haneef et al., 2015). In particular, Qard al-Hasaan can be extended to support the needs of the poor, the hardcore poor, the regular poor and the vulnerable poor (Aslam Haneef et al, 2015) because these groups are not ready to take funds for investments and they need to meet their immediate basic needs.

Poor people have the opportunity to engage with income-generating economic activities in a dignified and cost-effective manner if they are financed through Qard al-Hassan. This practice generates important social capital because it enhances trust and

harmony among all segments of society. Therefore, building a more cooperative and caring society is possible by promoting Qard-al-Hassan (Iqbal & Shafiq, 2015). For this to happen, its institutionalisation is very important. People can obtain a loan without interest from a Qard-al-Hassan-based institution on the basis of their merit, skills and expertise, and can be engaged with productive activities (Iqbal & Shafiq, 2015). They will thus be able to integrate and be included in mainstream society by escaping poverty.

The Islamic economic system cannot support any interest-based microfinance institutions, despite their worldwide coverage in terms of financing for the poor, because Islam considers *riba* (interest) to be exploitative, unjust and repressive, whether the rate is high or low. Hence, it is strictly prohibited (*haram*). However, the demand for microloans in society is undeniable. In this case, many scholars advocate Qard al-Hassan as a viable option for financing the poor (Iqbal & Mirakhor, 2013). Islamic financial institutions can develop financial products based on Qard al-Hassan to upgrade the knowledge and skills of recipients (Aslam Haneef et al., 2015). Thus, Qard al-Hassan can be used as an instrument to develop human resources.

Although it is an established practice to lend through Qard-al-Hassan throughout Islamic society, its institutionalisation is a recent phenomenon. Currently, it is formally used as one of the most advanced and suitable tools for microfinance and financial

inclusion. In Indonesia, a number of financial products have been developed using Qard-al-Hassan by Islamic microfinance institutions (Aslam Haneef et al, 2015). In addition, the Rural Development Scheme (RDS) of Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL) is providing Qard-al-Hassan of up to BDTK 10,000 (approx. 120 USD) for improving water, sanitation and rehabilitating rural poor people in Bangladesh (Farooqi, Qamar & Chachi, 2017).

The empirical findings on Qard-al-Hassan will now be presented. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) in Indonesia has a poverty alleviation model based on Qard al-Hassan financing. Widiyanto, Mutamimah and Hendar (2011) studied the effectiveness of the model and found that important figures in society, including Muslim religious leaders and economists, have endorsed the financing model as effective, as it empowers the needy to take part in economic activities. For this, the model has to be developed further. In another empirical work on BMT, Rokhman (2013) argues that its role in the improvement of income, education and business is significant, but not so with regard to access to healthcare. In contrast, a case study of AKHUWAT by Iqbal & Shafiq (2015) concludes that the contribution of Qard-al-Hassan to social and financial inclusion is not significant because the Qard-al-Hassan instrument has not been institutionalised in Muslim counties. Oyesanyaa and Salako (2019) studied the impact of Qard Al-Hassan in the

Al-Hayat Relief Foundation in Nigeria. They found that Al-Hayat had contributed to financial inclusion by improving financial access for deprived Muslim people through the provision of Qard al-Hassan and has empowered Muslim households economically in a sustainable manner, created employment opportunities, and promoted micro-entrepreneurship by way of strengthening the informal sector (Oyesanyaa & Salako, 2019).

Small business and start-ups can be supported by Qard-al-Hassan. The recipients can repay loans on an installment basis within the agreed period of time. Qard-al-Hassan-based microfinance institutions can only receive a fee in the form of a service charge. Therefore, doing business becomes less expensive compared to other sources of finance (Mansori, Chin, & Safari, 2015). Social collateral is the basis of Qard al-Hassan practice. Hence, it is a reliable source of funding for economic development because of the lower lending risk and the potential recirculation of funds among the poor (Mohieldin et al., 2011). The social cost of Qard al-Hassan funds is only limited to the opportunity cost of alternative usage of these funds. However, social benefits are extremely high because microfinance institutions (MFIs) can fund at zero cost and thus act as a good catalyst for growth and development. Qard al-Hassan funding can create jobs and generate income for the poor, deprived and unprivileged (Mohieldin et al., 2011).

In contrast, Izadyar & Ragnath (2014) highlight that Qard-al-Hassan is not a popular mechanism of financial lending because of the lack of participation by institutional investors and high administrative fees. They recommend the institutionalisation of Qard al-Hassan through the Islamic banking system (Izadyar & Ragnath, 2014); to this end, microfinance institutions can create Qard al-Hassan- based specific funds (Obaidullah & Khan, 2008).

2.3. Cyclone SIDR and the Fael Khair Waqf Program (FKWP)

Currently, Bangladesh ranks as one of the foremost disaster-prone countries in the world. Cyclones, storms, storm surges, floods, erosion etc. are now recurrent phenomena in the coastal area of the country. A study by MoEF shows that a tropical cyclone hits Bangladesh on average every three years (MoEF, 2008). Vulnerability in terms of human casualties is so severe in the country that 53 percent of total global deaths due to cyclones occur in Bangladesh, even though only 1 percent of the total global cyclones hit the country each year (Ali, 1999). An unnamed Category III cyclone hit in 1970 and killed nearly 500,000 people (Shamsuddoha & Chowdhury 2007) and Cyclone Gorky, a Category IV storm, struck Bangladesh in 1991, causing an estimated 140,000 fatalities. In 2007, Bangladesh was struck by super cyclone SIDR, leaving 3,406 people dead. SIDR may have been the strongest cyclone to hit the country, but it claimed far fewer lives than the cyclones of 1970 and 1991 because of

effective early warning, mobilisation through cyclone shelters and immediate implementation of disaster relief (Paul, 2009). However, although deaths from SIDR numbered in the thousands, damage to homes, crops and livelihoods was extensive and was reportedly worst. SIDR impacted the southwestern coast of Bangladesh, resulting in loss of life and considerable damage in 30 of the 64 districts of the country (InM, 2016). A total of 2.3 million people were affected at various degrees, while 1 million were affected severely. A study by IFRC estimates a total of Tk.115.6 billion worth of damage and loss caused by SIDR, with the share of damage to physical assets being Tk.79.9 billion and the remainder estimated as loss (IFRC, 2013).

The Fael Khair Waqf Program (FKWP) came as a response to the urgent need for assistance from the victims of SIDR. The program was developed when the Islamic Development Bank (IDB) was entrusted with a generous donation of USD 130 million from late King Abdullah. The program was named Fael Khair, meaning anonymous donor, because at the time it was believed the program was financed and supported by an anonymous individual philanthropist who was deeply touched by the colossal damage to property and the sufferings of the affected people. The person remained anonymous until his death, but is now known to have been the former king of Saudi Arabia, the late King Abdullah (InM, 2016). The purpose of the program was

to restore the livelihoods of a large segment of the victims of the cyclone and to lift them out of poverty. The program was implemented initially by four NGOs, namely BRAC, the Islamic Bank Foundation (IBF), the Voluntary Organization for Social Development (VOSD) and Muslim Aid Bangladesh (MAB). However, BRAC is currently not operating the program as they chose not to renew the contract after July 2012 (InM, 2016).

The fund was utilized in two key areas: school-cum-cyclone shelters, and a Rehabilitation Program. Out of the total Fael Khair Program (FKP) funds of USD 130 million, USD 110 million was allocated for the construction of several hundred shelters in the coastal belt of Bangladesh, with the remaining USD 20 million allocated as part of the rehabilitation programs (InM, 2016). The major components of these programs were designed with the agriculture and livestock sector and rural non-farm economic activities in mind. To this end, the programs included several components, including i) providing Qard al-Hassan (interest-free benevolent loans) for agricultural inputs (seeds, fertilisers and insecticides) and agricultural machinery (tractors); ii) providing Qard al-Hassan for small business; iii) replacement of livestock (cows, calves and goats); iv) replacement of fishing equipment (boats, nets); and v) various training programs (vocational, motivational, capacity building, etc.) (InM, 2016).

The most prominent feature of FKWP is the interest-free (Qard-al-Hassan- based) microcredit, which is especially designed for those affected by SIDR. Under this arrangement, these poor can borrow from the MFIs operating FKWP without any interest or service charge. There are no hidden costs in the loan contract; the borrower only has to return the principle amount of the loan. There is no formal requirement of savings for the arrangement of loan and no membership fee is required to become a member of FKWP (InM, 2016).

III. METHODOLOGY

3.1. Data

Up to 2015 (the completion year of FKW program) the total number of borrowers was around 0.2 million. From this population, data were collected randomly from 1200 participant (treatment) households who had been given Qard-Al-Hasan. In addition, 400 control households (who not given Qard-Al-Hasan) were selected from eight operating districts. As the study deals with investigating whether Qard- Al-Hasan has played any role in reducing poverty, both program and control group were employed to make a valid comparison. The treatment (participant) households were selected from 40 villages, and the control households were selected from 20 villages, giving a total of 60 villages.

3.2. Model Development

As mentioned earlier, this paper intends to observe how effective FKW has been in reducing poverty among the beneficiaries. Hence, it is necessary to calculate the poverty rates. We have followed the cost of basic needs (CBN) method to calculate these, as it is widely accepted approach, and the most satisfactory for building up a poverty line, while remaining in the spirit of attempting to ensure that the line covers basic needs (World Bank Poverty and Inequality Handbook, 2009). The first step in calculating the poverty rate in this approach is to determine the poverty lines and their elements. While constructing the poverty lines, this paper closely followed the guidelines of the World Bank's Handbook on poverty and inequality.

To investigate the effect of the FKW program on poverty, logistic regression analysis was conducted to examine the association between the poverty status of the households (the dependent variable), i.e. the log of the odds-ratio and the independent variables, such as the program status of households (i.e. whether the household received Qard-Al-Hasan or not), and other socio-economic characteristics. This model was intended to perfectly fit the type of analysis to be conducted, as it examines the association between (categorical or continuous) independent variables and one dichotomous dependent variable, which in this

case is being poor or not. When applying the model to our analysis, we followed Wooldridge (2010).

As mentioned above, for the purpose of the analysis the dependent variable is a dichotomous one, namely being poor or not. The interest variable is another dichotomous variable, which relates to whether the household received Qard-Al- Hasan or not, because this is the key variable through which we can construct a robust relationship between poverty status and program status. Other independent variables were the savings of the household head, land holdings of the household head, household size, educational qualifications of the household head, the household head's occupation, and living standards of the household in terms of access to electricity and safe water. We selected these variables as the related literature gives them as strong influences on poverty.

3.3. Method

As mentioned above, the CBN method is used for calculating poverty rates. Below we describe how the poverty line was measured and how the decision rules for being poor or non-poor were determined.

3.3.1 Poverty Lines and their Elements

A certain year's food, lower and upper poverty lines were determined in this method. The first step was to estimate the food poverty line (FPL), which is the cost of a fixed basket of food that is considered to provide 2,122 kCal per capita per day. The

eleven items that constitute this basket are rice, wheat, pulses, milk, oil, red meat, potatoes (including sweet potatoes), other vegetables (leafy and non-leafy), fish (small and large), sugar (jaggery and refined sugar) and fruits (banana). The total value of a fixed food basket will result in food poverty line for a particular year. It is represented by:

$$FPL_t = \sum_{it} P_{it} Q_i \quad (1.1)$$

where

FPL = the food poverty line

P = the price of an item in food basket

Q = the quantity of an item in the food basket

i = the items (rice, wheat, pulses, milk, oil, red meat, potato, other vegetable, fish, sugar and fruits)

t = the year.

3.3.2. Lower and Upper Poverty Lines

To estimate the lower and upper poverty lines, non-food allowances were calculated. The *lower non-food allowance* is the median amount spent by individuals on non-food items, when their *total consumption* equals the *food poverty line*. On the other hand, the *upper non-food allowance* is the median amount spent by individuals on non-food items, when their *total food consumption* equals the *food poverty line*.

The lower poverty line is estimated by adding the lower non-food allowance to the food poverty line:

$$\text{LowerPovertyLine} = \text{Food Poverty Line} + \text{Lower Non Food Allowance}$$

The upper poverty line is the summation of the upper non-food allowance and food poverty line:

$$\text{Upper Poverty Line} = \text{Food Poverty Line} + \text{Upper Non Food Allowance}$$

3.3.3. Measurement of Poverty Using the CBN Method

The three poverty lines estimated were used to measure the poverty incidences. A household was deemed poor if its annual per capita consumption expenditure was lower than a poverty line, while the intensity of poverty was determined with reference to difference poverty lines. If a household's annual per capita consumption expenditure was at most equal to the upper poverty line and above the lower poverty line, then it was categorized as moderately poor. A household was vulnerably poor if its annual per capita consumption expenditure was below or equal to the lower poverty line, but above the food poverty line. If annual per capita consumption expenditure was at most equal to the food poverty line, a household was deemed to be extremely vulnerable poor. Finally, any

household whose annual per capita expenditure was above the upper poverty line was considered non-poor. Table 1 summarises the decision rules and categories.

TABEL 1
Poverty Categories

Decision Rule	Poverty Category
Annual Per Capita Consumption Expenditure $\leq$ Food Poverty Line	Extremely Vulnerable Poor
Food Poverty Line $<$ Annual Per Capita Consumption Expenditure $\leq$ Lower Poverty Line	Vulnerable Poor
Lower Poverty Line $<$ Annual Per Capita Consumption Expenditure $\leq$ Upper Poverty Line	Moderately Poor

Source: InM Research Report for IDB (2015)

As mentioned previously, the intention was to conduct logistical analysis to investigate whether Qard-Al-Hasan has had any impact on households in terms of reducing poverty. A logistic regression will model the chance of an outcome (in this case being poor or non-poor) based on individual characteristics, such as receiving Qard-Al-Hasan and other socioeconomic characteristics. Because chance is a ratio, what will actually be modelled is the logarithm of the chance given by:

$$\text{Log} \left(\frac{P}{1-P} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k \quad (1.2)$$

where P indicates the probability of an event or outcome (e.g., being poor or non-poor), and β_i are the regression coefficients associated with the reference group and the X_i explanatory variables. It is important to mention that in this paper we have only considered households to be poor if they are below the lower food poverty line; i.e., the extremely vulnerable poor and vulnerably poor, with the remaining households considered non-poor. In our case, the logistic model would be:

$$\text{Logit}(P(X_{ij})) = \text{Log}(P(S_{ij})/(1-P(S_{ij}))) = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(Y_{ij}) + \beta_2 Z_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad (1.3)$$

Where :

$\text{Logit}(P(X_{ij}))$ = log of the odds ratio of poverty status (dummy variable) of household i in division j

Y_{ij} = program status (dummy variable) of household i in division j

Z_{ij} = vector of household's socio-economic characteristics, such as household head's occupation (dummy variable), education, household's access to electricity and

tubewells (dummy variables), and household's ownership of land and financial assets.

ε_{ij} = nonsystematic error, reflecting, in part, the unmeasured determinants of X_{ij} that vary between households.

IV. RESULTS AND ANALYSIS

4.1. Results

4.4.1. Incidence of Poverty

Table 2 shows the percentage of households with respect to each estimated poverty status in the southwestern region of Bangladesh, i.e. eight districts. It can be seen that around 29 percent of households in the sample are extremely poor. These households are basically those below the food poverty line. The vulnerably and moderately poor categories show the intensity of poverty of the households. We consider the vulnerably poor to be those households that are below or equal to the lower poverty line, but above the food poverty line. Table 2 shows that the percentage of vulnerably poor households is 29 percent of the total sample. This means the extremely poor and vulnerably poor constitute almost 60 percent of total households, and is one of the vital characteristics of this region. The region has borne the brunt of from two consecutive cyclones, SIDR and Aila and

households have suffered severe losses of assets and income. Hence, we observe such a high percentage of extreme and vulnerable poor in the sample.

The moderately poor are those households that lie below the upper poverty line but above the lower poverty line. From the analysis, these households constituted 10 percent of the total sample. The last category is non-poor. The poverty calculation shows that our sample comprised almost 32 percent non-poor households in the eight districts.

In order to consider any impact of the program, it is important to observe the poverty rates by program and control areas. Even though from cross sectional analysis the impact will not show the dynamics, it is worth taking into account any progress made. In Table 2 we have also compared the poverty head-counts of the program area with the control area.

TABEL 2
Percentage of Households with Respect to Poverty Lines
(Category)

Extremely Vulnerable Poor	Vulnerable Poor	Moderately Poor	Non-Poor
Aggregate (n=1597)	28.87	29.30	9.58
Program (n= 1199)	27.20	28.61	9.58
Control (n= 398)	34.42	31.41	9.04
Difference derived from t- test	-7.39**	-2.79	0.71

Source: Authors' calculation

It is shown that the percentage of extremely vulnerable poor households declined by nearly 7 percentage points for the program group compared to the control group, and the t-test also shows that the difference is significant. We have observed the same trend for vulnerably poor households. The percentage of vulnerable poor is 3 percentage points lower for the program group compared to the control group. On the other hand, non-poor households have increased significantly by 9 percentage points for the program area. The percentage of moderately poor is the same for both program and control. One plausible reason for finding more non-poor in the program area could be that these households have higher income, so have managed to leap over the poverty lines.

4.1.2. Characteristics of Households with respect to Poverty and Program Status

So far we have observed the poverty status of households in the program and control areas of our sample. However, for policy analysis it is very important to know who the poor are. What are their characteristics? What is their expenditure pattern? Do they save? What level of assets do they have? Table 3 shows the average income, expenditure, level of assets and savings for poor households in the program and control areas of our sample, along with some basic household characteristics.

TABEL 3
Characteristics of Households by Poverty Status

	Program (N=1199) Control (N=398)			Program (N=1199) Control (N=398)		
	HH below FPL	HH below LPL	HH below UPL	HH below FPL	HH below LPL	HH below UPL
Total Income (Taka)	90.85	101.23	105.40	78.36	86.25	89.58
Food Expenditur e (Taka)	38.48	42.89	44.37	35.22	40.41	41.42
Non-food Expenditur e (Taka)	16.56	20.20	21.36	14.91	19.20	20.24
Total Expenditur e (Taka)	55.04	63.09	65.73	50.13	59.61	61.66
Female- Headed HH	5.61%	5.42%	5.76%	11.68 %	7.63%	7.38%
Age of HH Head (Years)	44.74	44.37	44.68	45.72	45.53	45.68
Education	3.93	4.06	4.10	2.79	3.17	3.37

of HH Head (Years)						
HH Head's Primary Occupation is as Wage Earner	42.68 %	38.70 %	38.03 %	45.26 %	43.51 %	42.62 %
HH Head's Primary Occupation Is Self Employment (Agriculture)	14.64 %	14.91 %	14.98 %	10.95 %	16.41 %	17.79 %
HH Head's Primary Occupation is Self-Employment (Non-agriculture)	33.64 %	38.86 %	39.31 %	27.01 %	27.10 %	27.18 %
HH Head has	15.89	20.48	21.51	17.52	22.52	24.83

multiple earning sources	%	%	%	%	%	%
Total Land (Decimal)	18.23	24.99	25.45	17.93	29.55	32.53
Physical Assets without Land (Taka)	70.41	93.53	97.29	55.60	77.32	84.71
Financial Assets (Taka)	3.02	5.98	6.95	1.75	4.78	6.79
Total Assets	357.63	467.44	490.54	316.17	481.45	521.25

Source: Field survey

The analysis shows that poor households in the control area have lower income, expenditure, physical saving assets (without land) than in the program area, irrespective of their poverty status. We also found that extremely poor households (households below or equal to the food poverty line) have the lowest income, expenditure, assets and savings compared to the other two groups. The differences in these indicators are less

significant when comparing the households below the lower poverty line and those below the upper poverty line.

We also observe that the heads of extremely poor households are less educated than those of households living below the lower poverty line and upper poverty line. The average years of education of the household head is approximately 3 years, while for the other two groups it is 4 years. In addition, the heads of these households are mostly wage-earners; For than 40 percent of heads of extremely poor households are wage earners as their primary occupation. Moreover, the heads of extremely poor households have the lowest percentage of multiple earning sources. The analysis shows that only around 15 percent of extremely poor household heads have multiple sources of earning, whereas in the other two groups more than 20 percent of household heads have multiple earning sources. It is important to note that 25 percent of the heads of households living below or equal to the upper poverty line have multiple earning sources in the control areas.

It should be mentioned that the difference between food and non-food expenditure is higher for the group living below or equal to the food poverty line than for the other two groups. We can therefore say that extremely poor households spend more on food than non-food items. In the program areas, the percentage of female-headed households is consistent with respect to all the poor households, at around 5 percent. However, in

the control areas the percentage of female-headed households is highest in the extremely poor category, at around 12 percent. Regarding assets, the extremely poor households have average physical assets (without land) of Tk. 70,000, whereas households living below the lower poverty line and upper poverty line have physical assets worth Tk. 93,000 and Tk. 97,000 respectively. In addition, the extremely poor households have less land accumulation than the other two groups.

The above findings suggest that the poorer the household, the lower the income, expenditure and accumulation of assets. It is also observed that it is wage earners who fall under the poor category, rather than the self-employed. Female-headed households and less educated ones are more prone to be poor. Another important finding is that the control group has a higher number of households with lower income, lower assets, fewer educational qualifications of the household head, a lower number of households with multiple earners, and a higher number of wage-earners and female-headed households. This gives an indication that FKW beneficiaries are better off than the households not receiving FKW interest free loans. In the following section, we will check the robustness of this hypothesis through the t-test and logistic regression.

4.2. Robustness Test

4.2.1. Difference in Socio-Economic Characteristics of Program and Control Groups: Independent Sample T-Test

From the above discussion, we have observed certain characteristics of the poor. But are these characteristics statistically different between the program and control groups? With reference to Table x, we have some indication that the program group is better off than the control group in terms of socio-economic characteristics. However, we need to establish whether these results are robust. Table 4 shows the results of the independent sample t-test to observe whether the key characteristics of the poor are significantly different between the two groups. The results suggest that the program group has significantly higher income, higher food and non-food expenditure, and has more educationally qualified household heads and fewer wage earners. The findings indicate that these factors may have some influence on poverty, and hence we find there are significantly fewer poor in the program group.

TABEL 4

T-Test of Socio-Economic Characteristics of Program and Control Groups

	Program (N=1199)	Control (N=398)	Difference in t-test
Total Income (Taka in 1000s)	121.70	101.17	20.53***

FoodExpenditure (Taka in 1000s)	48.93	45.08	3.85***
Non-food Expenditure (Taka in 1000s)	30.29	27.24	3.05**
Education of HH Head (Years)	4.75	3.79	.95***
HH Head's PrimaryOccupation is Wage Earner (%)	30.5	39.44	8.92***
Poor Households (%)	65.38	74.87	9.48***

Source: Field Survey

4.2.2. Effectiveness of FKW in Reducing Poverty: Logistic Analysis

In the previous sections we have observed that the program group (the group that received Qard-Al-Hasan) has fewer poor households than the control group (the group not receiving Qard-Al-Hasan) and is better off than the control group in some key socio-economic characteristics. However, the above results do not confirm whether poverty has any effect on these characteristics. In addition, they do not indicate whether FKW has any significant impact on the poverty status of beneficiaries and if so, at what level. Hence, econometric analysis is important to observe how robustly FKW has contributed to reduce the poverty

status of the beneficiaries. Furthermore, we tested how well our logistic model fits the data with the Hosmer and Lemeshow chi-square and chi-square model test. We found the Hosmer and Lemeshow chi-square model to be insignificant, which indicates that the estimation fits the data. Moreover, the results of the chi-square test are significant, which indicates that all the independent variables included in the logistic model improve its fitness.

The logistic analysis in Table 5 confirms that the likelihood of the participants of FKW to be poor is around 1.46 times lower than that of the non-participants, with the results significant at the 5% level. This indicates that program has a positive impact on reducing poverty, as initially (before the commencement of the program) the socioeconomic characteristics were similar for both groups (program and control). If we further analyse the characteristics of the poor, we find that poor households have lower savings, less education, a lower level of land holdings and a higher household size than the non-poor households. Hence, we can argue that poor households are not only deprived of physical capital, but that they are also deprived of human capital. We also found that if the household head is a wage earner, then the probability of that household being poor is 1.43 times higher than for self-employed household heads. We also found that household heads with multiple earning sources had a 1.3 times significantly lower probability of being poor. The logit analysis

also shows that households with electricity access and tubewell water access had an almost two times lower probability of being poor than those without access. It is important to mention that as shown in Table 3, that FKW participants are better off than non-participants in terms of the above-mentioned indicators, irrespective of their poverty status. This indicates that the program may also have an effective impact on accumulating physical and financial assets and human capital and in achieving a better living standard.

TABEL 5
Impact of FKW on Reducing Poverty (Logistic Regression)

VARIABLE	If HH is below or equal to the lower poverty line	Standard error
Odds Ratio		
FKW participation	.6829893**	.0961643
HH savings	.9773638***	.0032585
HH land holdings	.9964389***	.000978
HH size	1.864107***	.0945782
Year of education of HH head	.9615045***	.0151876
If HH head is wage-earner	1.439023***	.2047532
If HH head has multiple earnings	.7530676**	.1137501

sources		
If HH has electricity access	.5230643***	.0800768
If HH has tubewell access	.4975234***	.1448416
Constant	.7568812	0.421
Hosmer-Lemeshow chi2	9.50	0.3018 (sig. level)
Pearson chi2	1709.25	0.0106*** (sig. level)
Observations	1,594	

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Source: Field Survey (2015)

4.3. Analysis

The above results suggest that the FKW program has had a significant impact on reducing poverty in the disaster-prone areas of Bangladesh. The logit analysis found that Qard-Al-Hasan receivers are 1.46 times less likely to be poor than non-receivers. This is expected, because given the feature of the FKW program of offering interest free loans, it is likely that, without any burden of interest payment on the beneficiaries, the income of the program households would be higher than that of the control households. This higher income enables them to spend more on any items required. It also helps them to move out of poverty. It is important to note that we have also found that FKW program

beneficiaries have significantly higher income and expenditure than non-beneficiaries.

Our findings are in line with those of Farooqi et al. (2017) in Bangladesh, Iqbal and Shafiq (2015) in Pakistan, and Effendi (2013) in Indonesia. Farooqi et al. (2017) conducted a study of 700 women in Bangladesh and found a positive and significant influence of the gross monthly income of borrowers. Iqbal and Shafiq (2015) investigated the AKHUWAT program as a case study of Qard-Al-Hasan and found that it had successfully improved the standard of living of its beneficiaries by transforming them into donors. Effendi (2013) conducted qualitative analysis of the role of Islamic microfinance in poverty alleviation, finding that Islamic microfinance was more successful than conventional microfinance in reducing poverty because of its interest-free financing options and more flexible repayment plans.

However, our findings contradict those of Widiyanto et al. (2011), who conducted a study of the business performance of 84 business Qard-Al-Hasan receivers and its impact on generating higher income. They found that there was no impact on business performance, as initial Qard-Al-Hasan financing was too low to have an impact on business performance, and hence the impact of financing was invisible. However, they found that business income and profit significantly increased while comparing entrepreneurs who received Qard-Al-Hasan financing for the first time (initial condition) and in the conditions when the research

was conducted (second condition). They argued that Qard-Al-Hasan contributed to the greater benefit of society, as the participants were willing to pay zakah and infaq. One of the crucial differences between our study and that of Widiyanto et al. (2011) is the sample size, sample characteristics and methodology. This study compares the findings of Qard-Al-Hasan receivers and non-receivers, not just comparing the before and after situation. Furthermore, our sample consists of 1600 households who basically are very poor and are situated in disaster-prone areas. For them, access to small interest free loans will have a greater impact on reducing poverty, as bearing cost of fund can be burdensome on them. On the other hand, Widiyanto et al.'s (2011) study evaluates relatively better-off households who are engaged in business activity and need large loans, which will have a significant impact on their business activity and thus reduce poverty. Therefore, the results of the two studies differ.

Although the findings of this study are similar to many other Islamic microfinance studies, it makes a unique contribution by explaining the role of Qard-Al-Hasan in poverty mitigation in several ways. First, this study deals with a large sample of household data, which creates strong ground for robust results. Second, it investigates the effectiveness of Qard-Al-Hasan on a sample attempting to cope with the aftermath of a severe disaster, as the program itself was instigated as a response to the urgent need for assistance by the victims of the disaster. Therefore,

the beneficiaries were already extremely vulnerable, as they had to deal with severe environmental shock. This implies that if the program is proved to have had a positive impact on the livelihood of these households, we can conclude that Qard-Al-Hasan has not only been very effective in improving the situation of just poor households, but has also played an important role in lifting the most extremely vulnerable segment of society from the bottom of the pyramid. This study has made a unique contribution by showing the effectiveness of Qard-Al-Hasan, as it has successfully been proven with robust results that it has played an important role in changing the lives of not only poor, but also the poorest of the poor.

V. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

5.1. Conclusion

This paper has addressed the effectiveness of the FKW program, which is a Qard- al-Hassan (interest-free benevolent loan), in reducing the poverty situation of the participants. The results show that the program has had a significant impact on reducing poverty when comparing the poverty headcount between the program and control area. They show that 27 percentage of households are extremely vulnerably poor in the program area, against 34 percentage of households in the control area, with the results statistically significant. The logistic analysis confirms that the probability of being poor for FKW participants is around 1.46 times lower than that of non-participants, with the results

significant at the 5% level. This indicates that the program has had a positive impact on reducing poverty, as initially (before the commencement of the program) the socioeconomic characteristics were similar for both groups (program and control). The findings also indicate that the FKW participants are better off than the control households. They have higher income and a greater ability to spend more on food and non-food items. As FKW offers interest-free loans, the cost of borrowing becomes significantly lower and hence people can accumulate more assets, which might help them to improve their economic status after the cyclone. This notion is validated by our results, as we found that program participants had greater financial assets than non-participants. Finally, we can say that FKW, by providing Qard-Al-Hasan, is an effective program in terms of poverty reduction, as it has contributed to higher economic outcomes for the participating households. It has played a vital role in lifting the most extremely vulnerable segment of society up from the bottom of the social pyramid.

5.2. Recommendation

Based on the findings, the study suggests the development of certain policies by practitioners, regulators and future researchers. First, considering the effectiveness of Qard-Al-Hasan in poverty reduction, practitioners should increase its outreach. Even traditional microfinance practitioners can develop a Qard-Al-Hasan component along with their traditional credit programs.

Second, the findings also show that savings can significantly influence poverty reduction. Based on this, Qard-Al-Hasan can be tied in with small amounts of savings. Accumulated savings over time will not only increase the ability of borrowing households to invest, but will also reduce their dependency on borrowed funds, acting as insurance against future losses for this vulnerable segment. In this way, the default rate can also be minimised. Third, the size of loans under Qard-Al-Hasan is usually small. Given its impact on poverty reduction, these could be increased. Larger loan sizes for enterprising borrowers will lead to sustainable graduation from poverty. Fourth, the third recommendation has important implications for regulators, who should provide incentives to Qard-Al-Hasan providers to offer larger loans. They could set a minimum level for providing a particular number of loans to entrepreneurs. They could also promote the institutionalisation of Qard-Al-Hasan, as it is still informal in nature in its operation. Fifth, the second and third recommendations provide scope for future research for the development of practitioners and academicians. Future research is necessary to develop the savings and large loan components under Qard-Al-Hasan, so that the model can be successfully used for reference and as a framework.

REFERENCES

- Ali, A. Y. (1989). The Holy Quran: Text, Translation, and Commentary. Maryland: Amana Corporation.
- Ali, A. (1999). Climate change impacts and adaptation assessment in Bangladesh, *Climate Research*, 12, 109-116.
- Aslam Haneef, M., Pramanik, A. H., Mohamed, M. O., Muhammad, A. D., & Amin, F. M. (2015). Integration of Waqf and Islamic microfinance for poverty reduction: Case studies of Malaysia, Indonesia and Bangladesh. The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC).
- Banerjee, A. V. & Duflo, E. (2011). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs.
- Effendi, J. (2013). The role of Islamic microfinance in poverty alleviation and environmental awareness in Pasuruan, East Java, Indonesia: A comparative study. Universitätsverlag Göttingen.
- Farooq, M.O. & El Ghattis, N. (2015). Qard Hasan, Credit Cards and Islamic Financial Product Structuring: Some Qur'anic and Practical Considerations. *Journal of Islamic Financial Studies*, 1(1), 1-21.
- Farooqi, A. H., Qamar, M. U. R., & Chachi, A. (2017). Role of Islamic Microfinance Scheme in Poverty Alleviation and Well-Being of Women Implemented by Islami Bank

- Bangladesh Limited. *İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi* (İEFD), 3(1), 1-32.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on poverty and inequality*. Washington: World Bank.
- IFRC (2013), *Emergency Appeal Six-Month Consolidated Report – Bangladesh: Tropical Cyclone Mahasen*.
- Institute for Inclusive Finance and Development (InM) (2016), *Impact Assessment Study of the FKW Rehabilitation and Livelihood Program and Implementing NGOs, Final Report prepared for Islamic Development Bank*. Dhaka: InM.
- Iqbal, Z., & Shafiq, B. (2015). *Islamic finance and the role of Qard-al-Hassan (Benevolent Loans) in enhancing inclusion: a case study of AKHUWAT*. *ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives*, 4(4), 23-40.
- Izadyar, A. B., Ragnath, F., & Özdemir, M. (2014). *A New Perspective of Benevolent Loan, Qard Al-Hassan, Using Upfront Payment ‘Mesbah Point’*. *Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 199-217.
- Mohieldin, M., Iqbal, Z. Rostom, A., & Fu, X. (2011). *The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in OIC Countries*. Presented at the 8th International Conference on Islamic Economics and Finance. Qatar: Center for Islamic Economic and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation

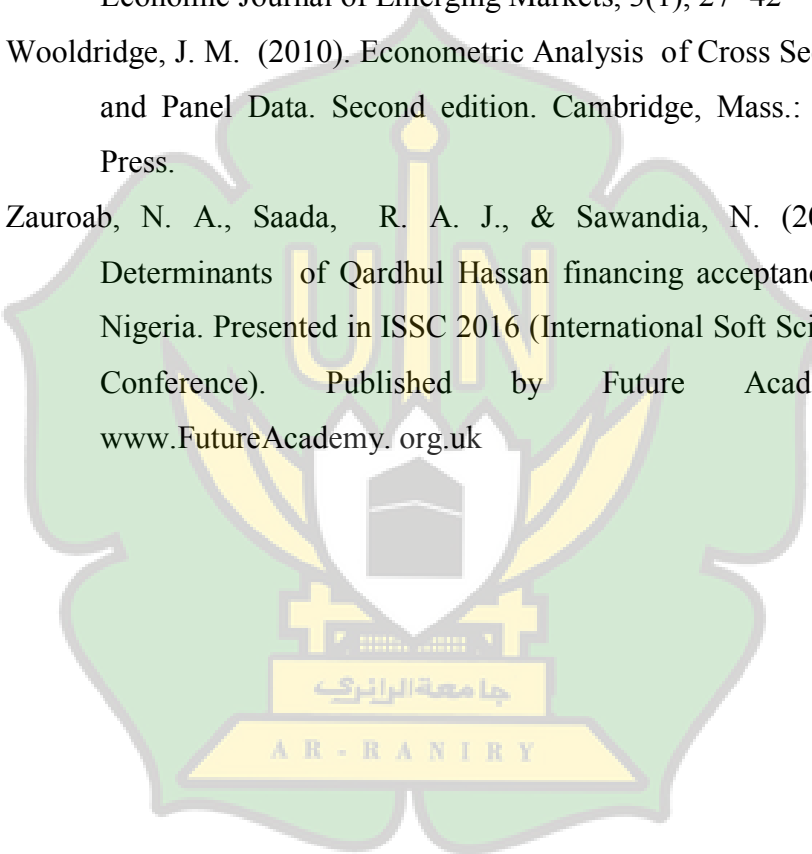
- Mansori, S., Chin, S. K., & Safari, M. (2015). A shariah perspective review on Islamic microfinance. *Asian Social Science*, 11(9), 273-280.
- MoEF (2008), Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, Dhaka: Ministry of Environment and Forests, Government of Bangladesh.
- Mojtahed, A., & Hassanzadeh, A. (2009). The Evaluation of Qard-al-Hasan as a Microfinance Approach in Poverty Alleviation Programs, 1–32.
- Obaidullah, M and Khan, T (2008), Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiative, IRTI-IDB, Jeddah
- Oyesanyaa, O.S. & Salako, T.A. (2019). A Sharī‘ Ah Assessment of Al-Qard Al- Ḥasan (Ethical Loan) and Its Impact in Al-Hayat Relief Foundation, Ogun State, Nigeria. *Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, 18, 40-59
- Paul, B. K. (2009). Why relatively fewer people died? The case of Bangladesh’s Cyclone Sidr. *Natural Hazards*, 50(2), 289-304.
- Rokhman, W. (2013). Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) and Poverty Empowerment. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, 1(2): 181-195
- Shamsuddoha, M., & Chowdhury, R. K. (2007). Climate change impact and disaster

vulnerabilities in the coastal areas of Bangladesh. COAST Trust, Dhaka.

Widiyanto, Mutamimah & Hendar (2011), Effectiveness of Qard al-Hasan Financing as a Poverty Alleviation Model, Economic Journal of Emerging Markets, 3(1), 27- 42

Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Second edition. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Zauroab, N. A., Saada, R. A. J., & Sawandia, N. (2016). Determinants of Qardhul Hassan financing acceptance in Nigeria. Presented in ISSC 2016 (International Soft Science Conference). Published by Future Academy. www.FutureAcademy.org.uk



BAB II

**QARD-AL-HASSAN SEBAGAI LAYANAN KEUANGAN
ISLAM DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN:
STUDI KASUS PROGRAM WAQAF FAEL KHAIR DI
BANGLADESH**

Farah Muneer¹ and Foyasal Khan²

1 Institut Keuangan dan Pengembangan Inklusif (INM),
Bangladesh, muneerfarah@gmail.com

2 Departemen Ekonomi, International Islamic University Malaysia
(IIUM), Malaysia, foyasal.khan@gmail.com

ABSTRAK

Fokus utama dari sistem ekonomi Islam adalah berpacu pada keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama di bagian paling bawah lapisan dasar piramida. Qard-al-Hassan, beserta zakat dan sedekah, adalah salah satu layanan untuk redistribusi pendapatan dan kekayaan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu dalam Islam. Pada tahun 2007, Bangladesh dilanda angin topan SIDR yang sangat dahsyat serta menewaskan sebanyak 3.406 orang. Selain itu, musibah SIDR mengakibatkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti rumah, tanaman, dan mata pencaharian. Berdirinya program Fael Khair Waqf (FKW) adalah sebagai sarana bantuan cepat tanggap terhadap kebutuhan mendesak untuk membantu para korban topan dan memprakarsai skema pinjaman mikro bebas

bunga (Qard-al-Hassan) dengan tujuan untuk memulihkan mata pencaharian dari sebagian besar korban serta untuk membantu mereka keluar dari zona kemiskinan. Disamping ingin melihat keefektifitas Qard-al-Hassan dalam mengatasi angka kemiskinan, penelitian ini juga mengkaji program FKW sebagai studi kasus. Analisis dilakukan terhadap 1600 keluarga (rumah tangga) dengan menggunakan uji-t sampel independen dan regresi logistik untuk melihat sejauh mana keefektifan program dalam mengurangi angka kemiskinan. Hasil dari analisis logistik ditemukan bahwa orang yang masuk dalam kategori miskin dan kemungkinan besar menjadi peserta FKW adalah sekitar 1,46 kali lebih rendah dari pada non-peserta. Selain itu, layanan Qard-al-Hassan juga meringankan biaya pinjaman secara signifikan dan karenanya para peserta dapat mengakumulasi lebih banyak aset, yang mana mungkin dapat membantu mereka dalam meningkatkan status ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa efektifnya suatu program dapat dicapai dari kerjasama antara praktisi pembangunan dan juga peneliti dalam mempromosikan dan memperkenalkan sarana Qard-al-Hassan, sehingga kaum fakir miskin dapat dengan mudah memanfaatkan jasa tersebut.

Kata kunci: Qard-al-Hassan; Pengentasan Kemiskinan, program Fael Khair Waqf (FKW); Biaya Metode Kebutuhan Dasar (CBN); Analisis logistik

Klasifikasi JEL: D31; G21; I32.

Sejarah artikel:

Diterima : 16 September 2019

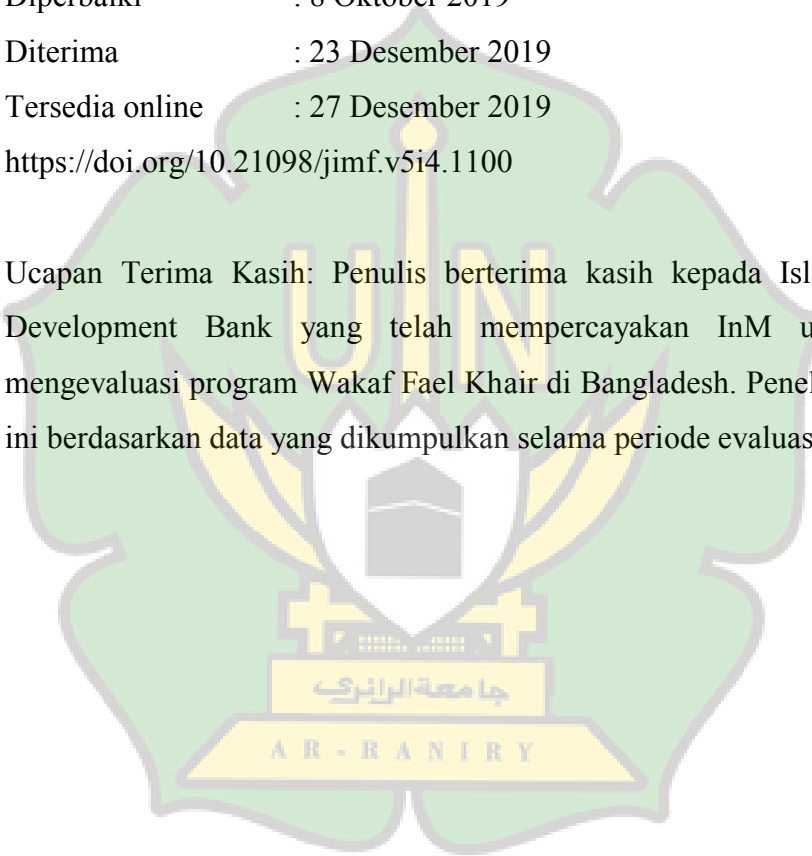
Diperbaiki : 8 Oktober 2019

Diterima : 23 Desember 2019

Tersedia online : 27 Desember 2019

<https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1100>

Ucapan Terima Kasih: Penulis berterima kasih kepada Islamic Development Bank yang telah mempercayakan InM untuk mengevaluasi program Wakaf Fael Khair di Bangladesh. Penelitian ini berdasarkan data yang dikumpulkan selama periode evaluasi.



I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Kesejahteraan bersama dari berbagai kalangan masyarakat dapat ditingkatkan jika keadilan ekonomi dan sosial mampu dibuktikan sesuai dengan arti sebenarnya dari istilah tersebut, yang mana merupakan sesuatu yang difokuskan oleh sistem ekonomi Islam secara terpusat. Dalam sistem Islam, setiap orang dapat mengejar kepentingan pribadi mereka dalam ranah kepentingan masyarakat yang lebih luas. Itulah sebabnya setiap individu yang dididik baik dengan moral, maka siap untuk mengorbankan kepentingan pribadi mereka sendiri jika mereka tidak sejalan dengan kepentingan bersama. Adapun produksi, konsumsi, distribusi, dan redistribusi adalah fitur dasar dari setiap sistem ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri yang berkaitan dengan pandangan filosofis, institusi, dan instrumen. Ada sejumlah lembaga dan instrumen keuangan sosial dalam Islam yang berpusat pada prinsip-prinsip kerja sama (al-taawoun), pembagian risiko (al-musharakat fi al-makhatir) dan keadilan sosial (al-adalah al-ijtimayyiah). Disamping itu, zakat, sadaqah, wakaf, dan Qard-al-Hassan adalah beberapa sarana Islam yang telah lama diaplikasikan yang mana dapat mendukung masyarakat dalam menyalurkan bantuan kekayaan dari segelintir orang mampu kepada para fakir miskin. Dengan cara ini, sarana ekonomi Islam bisa efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam upaya

mengatasi kemelaratan/kemiskinan (Iqbal & Shafiq, 2015; Mohieldin, Iqbal, Rostom, & Fu, 2011).

Sistem keuangan yang terbuka/inklusif dalam meningkatkan akses keuangan terhadap semua lapisan masyarakat adalah kunci untuk mengurangi angka kemiskinan (Mohieldin et al., 2011). Sejarah kejayaan peradaban Islam menjadi saksi fakta bahwa lembaga-lembaga Islam seperti zakat, wakaf dan Qard al-Hassan telah memainkan peran kunci dalam menciptakan masyarakat yang peduli, di mana kebutuhan dasar setiap orang terpenuhi (Zarqa, 1988; Siddiqi, 2004, dalam Aslam Haneef et al., 2015). Praktik Qard al-Hassan telah didorong berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama dan persaudaraan bersama dengan orang kaya yang memberikan pinjaman tanpa mengenakan bunga kepada mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga sarana tersebut mampu berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin dalam lingkungan masyarakat (Mojtahed & Hassanzadeh, 2009). Saat ini, sistem perbankan Islam mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan program pengentasan kemiskinan berdasarkan Qard-al-Hassan. Dengan demikian, sarana tersebut dapat meningkatkan inklusi keuangan di Bangladesh. Misalnya, program kredit mikro dapat ditawarkan melalui Qard-al-Hassan untuk mendistribusikan kembali pendapatan di antara masyarakat.

Bangladesh rentan terjadi bencana alam yang berulang, terutama di wilayah barat daya. Selama delapan tahun terakhir,

telah terjadi tiga angin topan yang mengakibatkan kerusakan di berbagai daerah. Bencana yang paling dahsyat adalah SIDR, jutaan orang terkena dampak di 12 wilayah¹, seperti Bagerhat, Khulna, Satkhira, Jhalokathi, Pirojpur, Barisal, Patuakhali, Barguna, Bhola, Gopalganj, Shariatpur and Madaripur. Aset fisik dan non-fisik hancur dan sumber mata pencaharian juga terpengaruhi. Dalam situasi tersebut, mereka membelanjakan tabungan mereka sendiri untuk bertahan hidup. Akan tetapi, sulitnya mencari mata pencaharian setelah terjadinya bencana SIDR tersebut. Islamic Development Bank dengan hibah US \$ 130 juta dari seorang donatur yang tidak dikenal merancang program khusus untuk keluarga yang terkena dampak SIDR, yang dikenal sebagai program Fael Khair Waqf (FKW). Dua belas kabupaten yang terkena dampak SIDR dipilih untuk mengimplementasi program tersebut. Program tersebut memiliki dua komponen yaitu mata pencaharian dan pembangunan rumah-rumah penampungan. Program ini pada dasarnya adalah model keuangan Islam yang didasarkan pada program keuangan mikro dengan pinjaman tanpa bunga, atau Qard al-Hassan.

Dalam buku Abhijit et al. *Poor Economy*, mereka berpendapat bahwa pemahaman yang tidak memadai tentang kemiskinan adalah alasan utama kegagalan sebagian besar

¹ delapan bagian negara Bangladesh dibagi menjadi 64 wilayah (pemerintah lokal bagian administrasi)

kebijakan anti-kemiskinan. Untuk membangun dunia tanpa angka kemiskinan, para peneliti harus memiliki kemauan untuk belajar dari bukti pengalaman yang telah terjadi (Banerjee & Duflo, 2011). Program Fael Khair Waqf (FKW) telah membawa peluang bagi kita untuk memahami seberapa efektif Qard al-Hassan bisa menjadi sarana pengentasan kemiskinan dalam bentuk percobaan lapangan.

Objektif

Secara umum, makalah ini membahas tentang peran Qard al-Hassan dalam pengentasan kemiskinan. Secara khususnya bertujuan untuk mengamati keberadaan program FKW dalam penurunan angka kemiskinan diantara para penerima bantuan tersebut khususnya bagi para keluarga (rumah tangga) yang terkena dampak SIDR/ Aila. Untuk mengukur angka kemiskinan, penelitian ini hanya berfokus pada metode biaya kebutuhan dasar (Cost of Basic Needs) karena ini merupakan pendekatan unidimensional. Metode Cost of Basic Needs hanya mengandalkan satu indikator rumah tangga yaitu total pengeluaran. Tetapi secara luas, metode tersebut digunakan untuk melihat bagaimana scenario kemiskinan yang terjadi dan untuk mengidentifikasi orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar harian mereka dan juga yang hidup dalam keadaan sangat melarat atau bahkan dapat mengancam jiwa mereka karena hidup dalam kemiskinan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang eksperimental dalam ranah

ekonomi Islam. Studi eksperimental tentang penerapan Qard al-Hassan dalam pengentasan angka kemiskinan adalah hal baru di Bangladesh. Sejauh pengetahuan peneliti, saat ini belum ada penelitian yang serupa dengan topik ini di negara tersebut. Fitur yang berbeda dari penelitian ini adalah: i) ukuran sampel yang besar, ii) adanya perbandingan dengan kelompok kontrol yang terpisah, dan iii) mengikutsertakan sejumlah partisipan yang telah berusaha bangkit dari guncangan bencana alam yang parah. Penelitian ini juga membahas tentang peran Qard-Al-Hasan yang tidak hanya memberi bantuan kepada keluarga miskin, tetapi juga bagi orang-orang yang sangat rentan mengalami bencana parah yang menyebabkan kerugian besar bagi kehidupan dan aset mereka. Dengan demikian, penelitian ini terbilang unik karena mengeksplorasi area yang belum pernah dibahas sebelumnya dalam studi eksperimental serta ini juga motivasi utama penulis dalam melakukan penelitian ini.

II TINJAUAN LITERATUR

2.2. Qard-al-Hassan: Makna, Definisi dan Karakteristik

Qard-al-Hassan terdiri dari dua kata kunci: Qard berarti pinjaman, sedangkan Hassan berarti indah/baik. Karena itu, makna literasi dari Qard-al-Hassan adalah 'pinjaman yang indah/baik'. Sementara Abdullah Yusuf Ali (1872-1948) menggunakan makna ini dalam terjemahannya terhadap Alquran, Marmaduke Pickthall menyebutkan dua makna lain dari Qard-al-Hassan dalam Makna Al-Qur'an menurutnya: (a) pinjaman yang bagus (lihat, Al-Qur'an,

2: 245; 57:11; 57:18; 73:20), dan (b) pinjaman yang ramah (lihat, Al-Qur'an, 5: 12). Halini jelas terlihat bahwa asal kata Qard-al-Hassan adalah berasal dari dari ayat-ayat Al-Qur'an dimana disebutkan bahwa jenis pinjaman ini dilakukan langsung kepada Allah dan bukan kepada si penerima. Ini mungkin alasan untuk menyebutnya sebagai "pinjaman indah" (Iqbal & Shafiq, 2015). Qard-al-Hassan juga disebut sebagai 'pinjaman yang baik hati' (lihat Izadyar & Ragnath, 2014; Iqbal & Shafiq, 2015). Ali (1989, p.100) berpendapat bahwa "pinjaman indah" adalah metafora untuk membelanjakannya di jalan Allah. Pinjaman tersebut tidak hanya sebagai benteng kebaikan jiwa setiap insan, tetapi juga memiliki banyak berkah karena niat utama Qard al-Hassan ini karena Allah yang dengan kekuasaanNya lah kunci dari kemauan atau keinginan. Seseorang yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah sulit untuk menolak dalam memberikan Qard-al-Hassan kepada mereka yang layak diberi. Dalam hal Qard al-Hassan, orang yang melakukan peminjaman tersebut (kreditur) tidak mengharapkan pengembalian atas pokok dari pinjaman sukarela ini dan bahkan tidak menekan debitur untuk mengembalikannya dalam periode tepat atas kehendaknya sendiri, meskipun itu merupakan kewajiban moral bagi debitur untuk mengembalikannya (Mohieldin et al., 2011). Namun, kreditur akan mengesampingkan permintaan pembayaran pokok jika peminjam tidak dapat membayar kembali karena kesulitan ekonomi, terlepas dari upaya terbaik dan niat baiknya (Iqbal & Shafiq, 2015).

Glosarium Istilah Ekonomi Islam menyatakan bahwa Qard al-Hasanah adalah “Pinjaman tanpa bunga yang diberikan terutama untuk tujuan kesejahteraan. Peminjam hanya diharuskan membayar kembali jumlah yang dipinjam. ” Dengan cara yang sama, Umer Chapra (2005) mendefinisikan Qard-al-Hassan sebagai pinjaman yang dikembalikan pada akhir periode yang disepakati tanpa bunga bagian dalam laba rugi dari peminjam. Mohammad Nejatullah Siddiqi menyatakan bahwa "Qard-al-Hassan adalah pinjaman tanpa kewajiban bagi peminjam untuk membayar lebih dari berapa yang mereka pinjam." Demikian pula, Izadyar dan Ragnath (2014) menjelaskan bahwa "Qard al-hasan adalah pinjaman tanpa bunga di mana hanya pengembalian modal yang diperlukan selama jangka waktu pinjaman."

Allah SWT akan melimpahkan rezeki yang berlipat ganda kepada Qard-al-Hassan. Tidak seperti zakat dan sedekah, Qard al-Hassan bukan hadiah, melainkan pinjaman yang harus dilunasi. Ini adalah instrumen pengembangan untuk menjaga martabat manusia karena hanya peminjam yang memiliki kesempatan untuk menentukan jangka waktu pinjaman. Qard al-Hassan memiliki arti penting dalam sejumlah ayat dalam Quran (2: 245; 57:11 & 18; 64:17). Ganjaran yang diberikan pada Qard al-Hassan bahkan lebih tinggi daripada shadaqah (amal umum). Pahala untuk sedekah hanya sepuluh kali lipat, sedangkan Qard al-Hassan sebanyak delapan belas kali lipat, seperti yang telah disampaikan oleh Nabi (Mohieldin et al., 2011). Secara umum, shadaqah diberikan kepada

seseorang yang tidak mampu membayarnya kembali, sedangkan siapapun bangsawan dapat menerima Qard al-Hassan selama masa-masa sulit mereka dan membayarnya kembali ketika mereka telah mampu. Oleh karena itu, praktik Qard al-Hassan menghasilkan rasa persaudaraan dan mendorong kerjasama. Kedua pihak (penerima dan pemberi) menikmati status yang sama. Namun, seorang peminjam harus selalu berhubungan baik sehubungan dengan membayar utangnya.

Allah berjanji akan mengampuni dosa dan memberikan tempat di surga kepada siapapun yang meminjamkan kepadaNya. Allah berfirman, “Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasul-Ku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai.”(Al-Quran, 5:12). Dalam Q.S. Al-Muzzammil ayat 20, Allah berfirman, “....maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Pemberi pinjaman tidak mengharapkan imbalan uang apapun saat memberikan Qard-al-

Hassan. Sebagai gantinya mereka mengharapkan imbalan dari Allah di dunia ini atau di akhirat atas amalan kebaikan mereka (Iqbal & Shafiq, 2015).

2.2. Qard-al-Hassan: Alat untuk menekan garis Kemiskinan, Inklusi Keuangan, dan Sosial

Untuk kepentingan inklusi keuangan, banyak lembaga kredit mikro berfungsi di seluruh dunia baik di tingkat formal maupun informal. Lembaga-lembaga ini memberikan pinjaman relatif rendah kepada orang yang kurang mampu tetapi membebankan suku bunga yang sangat tinggi. Meskipun demikian, kurangnya bukti akademis yang kredibel tentang peran lembaga-lembaga ini dalam pengentasan angka kemiskinan, kasus peminjam yang bunuh diri banyak terjadi di Andhra Pradesh, India. Mereka telah menggagaskan sistem peminjaman yang dinilai rapuh berdasarkan program kredit mikro berbasis bunga. Sebaliknya, Qard al-Hassan adalah sebagai sarana yang tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga untuk inklusi keuangan dan sosial (Iqbal & Shafiq, 2015; Aslam Haneef et al., 2015).

Orang yang tidak mampu dapat memiliki akses yang lebih mudah ke layanan keuangan dengan biaya yang cukup rendah pula jika Qard al-Hassan beserta wakaf dan zakat tentunya, dipraktikkan secara efektif oleh lembaga keuangan Islam (Aslam Haneef et al., 2015). Secara khusus, Qard al-Hasaan dapat membantu menyalurkan bantuan kebutuhan harian orang miskin, orang miskin

sekali, orang miskin biasa, dan orang yang sangat rentan dengan kemiskinan (Aslam Haneef et al, 2015) karena kelompok-kelompok tersebut tidak mampu mengambil dana untuk investasi serta mereka juga harus memenuhi kebutuhan dasar harian mereka masing-masing.

Orang yang kurang mampu juga berpeluang terjun dalam kegiatan ekonomi yang mana mereka mampu menghasilkan pendapatan dengan cara yang lebih bermartabat dan hemat biaya jika mereka didanai oleh Qard al-Hassan. Praktek ini menghasilkan modal sosial yang penting karena meningkatkan kepercayaan dan harmoni di antara semua segmen masyarakat. Oleh karena itu, menciptakan kerjasama yang baik diantara masyarakat yang lebih kooperatif dan peduli dengan mempromosikan Qard-al-Hassan adalah tidak ada yang tidak mungkin dilakukan (Iqbal & Shafiq, 2015). Oleh karena itu, keberadaan lembaga tersebut sangat penting di lingkungan masyarakat. Orang dapat memperoleh pinjaman tanpa bunga dari lembaga berbasis Qard-al-Hassan berdasarkan prestasi, keterampilan, dan keahlian mereka, dan dapat bekerjasama pula dengan kegiatan produktif lainnya (Iqbal & Shafiq, 2015). Dengan demikian, mereka akan dapat saling berintegrasi satu sama lain serta menjadi bagian dari masyarakat yang berjuang keluar dari zona kemiskinan.

Sistem ekonomi islam tidak mendukung lembaga keuangan mikro berbasis bunga meskipun cakupan dunia pekerjaan mereka adalah dalam hal pembiayaan keuangan bagi orang-orang yang

tidak mampu. Islam menganggap bahwa riba (bunga) yang dikeruk secara berlebihan itu sifatnya tidak adil serta menekan hak para peminjam baik bunganya tinggi maupun rendah. Bagaimanapun juga sifatnya sangat dilarang (haram). Meskipun demikian, permintaan kredit mikro di lingkungan masyarakat juga tidak bisa dihindari. Dalam hal ini, banyak cendekiawan menganjurkan bahwa Qard al-Hassan adalah pilihan yang tepat untuk membantu keuangan fakir miskin (Iqbal & Mirakhor, 2013). Lembaga keuangan islam juga mampu menciptakan produk-produk ekonomi berbasis Qard al-Hassan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan para penerima uang tersebut (Aslam Haneef et al., 2015). Oleh karena itu, Qard al-Hassan dinilai dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia.

Meskipun demikian, Qard-al-Hassan merupakan praktek peminjaman yang layak bagi umat islam dimana lembaganya masih terbilang baru. Saat ini, lembaga tersebut secara resmi digunakan sebagai salah satu sarana yang paling canggih dan sesuai untuk keuangan mikro serta inklusi keuangan. Di Indonesia, sejumlah produk keuangan telah dikembangkan menggunakan Qard-al-Hassan oleh lembaga keuangan mikro Islam (Aslam Haneef et al, 2015). Selain itu, Skema Pembangunan Pedesaan (Rural Development Scheme) Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL) menyalurkan pada Qard-al-Hassan hingga BDTK 10.000 (sekitar 120 USD) untuk membantu meningkatkan air, sanitasi dan juga

merehabilitasi orang miskin pedesaan di Bangladesh (Farooqi , Qamar & Chachi, 2017).

Temuan empiris mengenai Qard-al-Hassan akan dipaparkan berikut ini. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia menangani kasus kemiskinan berdasarkan jenis pembiayaan dari Qard al-Hassan. Widiyanto, Mutamimah, dan Hendar (2011) mengkaji keefektifan Qard al-Hassan tersebut dan mengenal tokoh-tokoh pentingnya dalam masyarakat, termasuk para pemimpin agama Islam serta ekonomi. Mereka juga telah mendukung jenis pembiayaan seefektif itu karena dapat memberdayakan mereka yang membutuhkan dana untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, model pembiayaan tersebut harus dikembangkan lebih lanjut. Dalam karya empiris lain tentang BMT, Rokhman (2013) berpendapat bahwa peran Qard al-Hassan dalam peningkatan pendapatan, pendidikan dan bisnis terbilang cukup signifikan, tetapi tidak demikian dalam hal akses layanan kesehatan. Sebaliknya, studi kasus AKHUWAT oleh Iqbal & Shafiq (2015) menyimpulkan bahwa kontribusi Qard-al-Hassan untuk inklusi sosial dan keuangan tidak signifikan karena instrumen Qard-al-Hassan belum dilembagakan di negara-negara Muslim. Oyesanyaa dan Salako (2019) mempelajari dampak Qard Al-Hassan di Yayasan Bantuan Al-Hayat di Nigeria. Mereka melihat bahwa Al-Hayat telah berkontribusi terhadap inklusi keuangan dengan meningkatkan akses keuangan untuk orang-orang Muslim yang kurang mampu melalui penyediaan Qard al-Hassan

dan telah memberdayakan rumah tangga umat Muslim secara ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan kewirausahaan mikro dengan cara memperkuat sektor informal (Oyesanyaa & Salako, 2019).

Bisnis kecil-kecilan dan perusahaan baru dapat didukung oleh Qard-al-Hassan. Penerima dapat membayar pinjaman berdasarkan angsuran dalam periode waktu yang telah disepakati. Lembaga keuangan mikro berbasis Qard-al-Hassan hanya dapat menerima biaya dalam bentuk biaya layanan. Oleh karena itu, berbisnis menjadi lebih murah dibandingkan dengan sumber keuangan lainnya (Mansori, Chin, & Safari, 2015). Jaminan sosial adalah dasar dari praktik Qard al-Hassan. Oleh karena itu, Qard al-Hassan merupakan sumber pendanaan yang dapat diandalkan untuk pembangunan ekonomi karena risiko pinjaman yang lebih rendah dan potensi resirkulasi dana di antara orang yang tidak mampu (Mohieldin et al., 2011). Dana sosial Qard al-Hassan hanya sebatas pada kemudahan anggaran dari penggunaan alternatif dana tersebut. Namun, manfaat sosial sangat tinggi karena lembaga keuangan mikro (LKM) dapat mendanai dengan biaya nol dan juga sebagai penghubung yang baik untuk pertumbuhan dan pembangunan. Pendanaan Qard al-Hassan dapat menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat miskin, miskin papa, dan tidak mampu (Mohieldin et al., 2011)

Sebaliknya, Izadyar & Ragnath (2014) mengemukakan bahwa Qard-al-Hassan bukanlah mekanisme pinjaman keuangan

yang diminati karena kurangnya partisipasi oleh para investor institusi dan biaya administrasinya yang terbilang tinggi. Mereka merekomendasikan pelembagaan Qard al-Hassan melalui sistem perbankan Islam (Izadyar & Ragnath, 2014). Jadi, lembaga keuangan mikro dapat menciptakan dana khusus berbasis Qard al-Hassan (Obaidullah & Khan, 2008).

2.3 Angin topan SIDR dan Program Wakaf Fael Khair

Saat ini, Bangladesh berada di peringkat salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia. Topan, badai, gelombang badai, banjir, erosi dll. Sekarang menjadi fenomena berulang di wilayah pesisir negara tersebut. Sebuah studi oleh KLHK menunjukkan bahwa topan yang menghantam Bangladesh rata-rata terjadi setiap tiga tahun (KLHK, 2008). Angin topan yang menewaskan manusia kerap kali terjadi dan rentan di negara itu sehingga 53 persen dari total kematian global akibat topan terjadi di Bangladesh, meskipun hanya 1 persen dari total badai global menghantam negara itu setiap tahun (Ali, 1999). Topan Kategori III yang tidak disebutkan namanya melanda pada tahun 1970 dan menewaskan hampir 500.000 orang (Shamsuddoha & Chowdhury 2007) dan Topan Gorky, badai Kategori IV, menghantam Bangladesh pada tahun 1991, yang diperkirakan sebanyak 140.000 kasus kematian. Pada 2007, Bangladesh dilanda topan SIDR, menewaskan 3.406 orang. SIDR mungkin merupakan topan terkuat yang pernah melanda negara itu, tetapi merenggut korban jiwa jauh lebih sedikit daripada topan tahun 1970 dan 1991 karena adanya

peringatan dini yang efektif, arahan tempat perlindungan topan, dan adanya bantuan bencana cepat tanggap (Paul, 2009). Namun, meskipun kematian akibat SIDR berjumlah ribuan, kerusakan rumah, tanaman, dan mata pencaharian sangat banyak dan dilaporkan paling buruk. SIDR berdampak pada pantai barat daya Bangladesh yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan yang cukup besar di 30 dari 64 wilayah di negara tersebut (InM, 2016). Sebanyak 2,3 juta orang terkena dampak di berbagai sisi, sementara 1 juta orang terkena dampak parah. Sebuah studi dari IFRC memperkirakan bahwa total Tk.115.6 miliar kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh topan SIDR, dengan kerusakan yang terjadi pada aset fisik adalah senilai Tk.79.9 miliar dan sisanya diperkirakan sebagai kerugian (IFRC, 2013).

Program Wakaf Fael Khair muncul sebagai sarana cepat tanggap dalam menyalurkan kebutuhan mendesak kepada para korban topan SIDR. Program ini dikembangkan ketika Islamic Development Bank (IDB) dipercayakan sebagai penyalur sumbangan sebesar \$ 130 juta dari almarhum Raja Abdullah. Program itu bernama Fael Khair, yang berarti donatur yang tidak diketahui siapa orangnya (hamba Allah), karena pada saat itu diyakini program itu dibiayai dan didukung oleh seorang dermawan yang tidak dikenal yang sangat tersentuh hatinya atas bencana alam tersebut baik dari kerusakan properti maupun penderitaan orang-orang yang terkena dampak. Orang itu tetap tidak diketahui siapa pribadinya sampai ia meninggal, tetapi sekarang dikenal sebagai

mantan raja Arab Saudi, almarhum Raja Abdullah (InM, 2016). Tujuan dari program ini adalah untuk memulihkan mata pencaharian sebagian besar korban topan dan mengangkat mereka keluar dari kemiskinan. Program ini awalnya dilaksanakan oleh empat LSM, yaitu BRAC, Islamic Bank Foundation (IBF), Organisasi Sukarela untuk Pembangunan Sosial (VOSD) dan Muslim Aid Bangladesh (MAB). Namun, BRAC saat ini tidak mengoperasikan program tersebut karena mereka memilih untuk tidak memperpanjang kontrak setelah Juli 2012 (InM, 2016).

Dana tersebut difungsikan pada dua bidang utama: tempat perlindungan dari Angin topan dan Program Rehabilitasi. Dari total dana Program Fael Khair sebesar USD 130 juta, USD 110 juta dialokasikan untuk pembangunan beberapa ratus tempat penampungan di pesisir pantai Bangladesh, dengan sisa USD 20 juta dialokasikan sebagai bagian dari program rehabilitasi (InM, 2016). Komponen utama dari program-program ini dirancang dengan mempertimbangkan sektor pertanian dan peternakan serta kegiatan ekonomi non-pertanian pedesaan. Dalam hal ini, program tersebut mencakup beberapa komponen, yaitu i) mendukung Qard al-Hassan (pinjaman baik tanpa bunga) untuk keperluan pertanian (biji, pupuk, dan insektisida) serta mesin pertanian (traktor), ii) mendukung Qard al-Hassan untuk menerapkan bisnis kecil-kecilan; iii) penukaran hewan ternak (sapi, anak sapi, dan kambing); iv) penggantian alat tangkap (perahu, jaring), dan v) berbagai program

pelatihan (kejuruan, motivasi, pengembangan kapasitas, dll.) (InM, 2016).

Fitur paling menonjol dari program FKW adalah kredit mikro tanpa bunga (berbasis Qard-al-Hassan), yang dirancang khusus untuk mereka yang terkena dampak SIDR. Dengan layanan ini, kaum miskin dapat meminjam dari LKM yang mengoperasikan FKW tanpa bunga atau biaya layanan. Tidak ada biaya tersembunyi dalam kontrak pinjaman dalam artian peminjam hanya perlu mengembalikan jumlah pokok pinjaman. Tidak ada syarat resmi tabungan dalam aturan pinjaman dan tidak ada pula biaya keanggotaan yang diperlukan untuk menjadi anggota program FKW (InM, 2016).

III. METODOLOGI

3.1 Data

Hingga tahun 2015 (tahun penyelesaian program FKW), jumlah peminjam pada layanan Qard-Al-Hasan adalah sekitar 0,2 juta. Dari populasi ini, sebanyak 1200 rumah tangga (keluarga) peserta penelitian yang dikumpulkan secara acak telah diberi layanan Qard-Al-Hasan. Selain itu, 400 rumah tangga kontrol (yang tidak diberi layanan Qard-Al-Hasan) dipilih dari delapan kabupaten yang beroperasi sebagaimana tujuan penelitian ini yaitu ingin melihat apakah Qard-Hasan telah menjalankan perannya di sektor manapun dalam mengurangi angka kemiskinan, baik di bidang program maupun di bagian kelompok kontrol yang berfungsi sebagai pembuat perbandingan yang akurat. Rumah

tangga yang diteliti (peserta penelitian) dipilih dari 40 desa, dan rumah tangga kontrol dipilih dari 20 desa. Jadi, total keseluruhan sebanyak 60 desa.

3.2 Pengembangan Model

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, makalah ini bertujuan untuk mengamati seberapa efektif FKW dalam mengurangi kemiskinan di antara para penerima manfaat layanan tersebut. Oleh karena itu, mengukur tingkat kemiskinan masyarakat dirasa sangat perlu. Peneliti telah menjalankan metode biaya kebutuhan dasar (CBN) dalam mengukur garis kemiskinan karena jenis pendekatan ini dapat diterima secara global khususnya dalam membatasi angka kemiskinan sembari tetap terus semangat berusaha dalam memastikan layanan tersebut mampu mencakup kebutuhan dasar mereka (Buku Panduan Kemiskinan dan Ketimpangan Bank Dunia, 2009). Langkah pertama dalam mengukur tingkat kemiskinan dalam pendekatan ini adalah menentukan garis kemiskinan dan elemen-elemennya. Dalam menentukan garis kemiskinan, penelitian ini erat mengambil pedoman dari Buku Pegangan Bank Dunia tentang kemiskinan dan ketidaksetaraan. Untuk melihat pengaruh program FKW terhadap kemiskinan, maka digunakanlah analisis regresi logistik dengan tujuan untuk menguji hubungan antara status kemiskinan rumah tangga (variabel dependen), yaitu log dari odds-rasio dan variabel independen, seperti program status rumah tangga (yaitu apakah rumah tangga tersebut menerima Qard-Al-Hasan atau tidak), dan

karakteristik sosial-ekonomi lainnya. Model ini dimaksudkan agar sesuai dengan jenis analisis yang akan dilakukan, karena memeriksa hubungan antara variabel independen (kategoris atau kontinu) dan satu variabel dependen dikotomis yang dalam hal ini masuk dalam kategori miskin atau tidak. Peneliti berpedoman pada Wooldridge (2010) ketika menerapkan model tersebut dalam analisis peneliti.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, untuk keperluan analisis, variabel dependennya adalah dikotomis, yaitu miskin atau tidak. Variabel bunga adalah variabel dikotomis lain yang berhubungan dengan apakah rumah tangga menerima Qard-Al-Hasan atau tidak, karena ini adalah variabel kunci, melalui kita dapat membina hubungan yang kuat antara status kemiskinan dan status program. Disamping itu, variabel independen lainnya adalah tabungan kepala rumah tangga, kepemilikan tanah oleh kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, kualifikasi pendidikan kepala rumah tangga, pekerjaan kepala rumah tangga, dan standar hidup rumah tangga dalam mengakses listrik dan juga air bersih. Peneliti menganggap bahwa variabel-variabel tersebut benar-benar berpengaruh kuat pada lonjakan angka kemiskinan.

3.3 Metode

Seperti pembahasan sebelumnya, metode CBN digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Di bawah ini peneliti jelaskan bahwa bagaimana garis kemiskinan diukur dan bagaimana aturan penentuan kategori miskin atau tidak.

3.3.1 Garis Kemiskinan beserta Elemen-elemennya

Tinggi rendahnya garis kemiskinan ditentukan dalam hal pasokan makanan pokok tahunan. Langkah pertama adalah memperkirakan garis kemiskinan pangan (*food poverty line*) dimana biaya sekeranjang makanan sebesar 2.122 kCal per kapita per hari. Kesebelas item yang dimaksud dalam keranjang ini adalah beras, gandum, kacang-kacangan, susu, minyak, daging merah, kentang (termasuk ubi jalar), sayuran lain (berdaun dan tidak berdaun), ikan (kecil dan besar), gula (jaggery dan halus) gula) dan buah-buahan (pisang). Harga total keranjang makanan tersebut juga tetap akan menyebabkan lonjakan kemiskinan pada sektor makanan di tahun tertentu. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$FPL_t = \sum_{it} P_{it} Q_i \quad (1) \quad (2.1)$$

dimana,

FPL = garis kemiskinan makanan (*food poverty line*)

P = harga barang dalam keranjang makanan

Q = jumlah item dalam keranjang makanan

i = barang (beras, gandum, kacang-kacangan, susu, minyak, daging merah, kentang, sayuran lainnya, ikan, gula dan buah-buahan)

t = tahun.

3.3.2 Tinggi Rendahnya Garis Kemiskinan

Untuk memperkirakan tinggi rendahnya garis kemiskinan, maka dihitunglah anggaran non-pangan. Rendahnya anggaran non-pangan merupakan jumlah rata-rata makanan yang dikonsumsi oleh setiap orang terhadap barang-barang non-pangan ketika total konsumsi mereka sesuai dengan garis kemiskinan pada sektor pangan. Di sisi lain, tingginya anggaran non-pangan adalah jumlah rata-rata yang dihabiskan oleh setiap individu untuk barang-barang non-pangan ketika total konsumsi mereka sesuai dengan garis kemiskinan pangan.

Rendahnya garis kemiskinan diperkirakan dengan cara menambahkan rendahnya anggaran non-pangan terhadap garis kemiskinan pangan:

$$\text{Rendahnya garis kemiskinan} = \text{Garis Kemiskinan pangan} + \text{rendahnya anggaran non-pangan}$$

Meningkatnya garis kemiskinan adalah hasil perhitungan dari anggaran non-pangan dan garis kemiskinan pangan:

$$\text{Meningkatnya Garis Kemiskinan} = \text{Garis Kemiskinan pangan} + \text{meningkatnya anggaran Non Pangan}$$

3.3.3 Pengukuran Kemiskinan Menggunakan Metode CBN

Adapun tiga garis kemiskinan yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengukur kasus kemiskinan. Sebuah rumah

tangga dianggap miskin jika pengeluaran konsumsi per kapita tahunannya lebih rendah dari garis kemiskinan, sedangkan meningkatnya angka kemiskinan ditentukan pada acuan perbedaan garis kemiskinan. Jika pengeluaran konsumsi per kapita tahunan rumah tangga paling banyak adalah sebanding dengan tingginya garis kemiskinan dan berada di atas rendahnya garis kemiskinan, maka itu dikategorikan sebagai kategori cukup miskin. Selanjutnya, sebuah rumah tangga dikatakan sangat miskin jika pengeluaran konsumsi per kapita tahunan di bawah atau sama dengan rendahnya garis kemiskinan, tetapi berada di atas garis kemiskinan pangan. Jika pengeluaran konsumsi per kapita tahunan paling banyak sama dengan garis kemiskinan pangan, sebuah rumah tangga dianggap sangat miskin/miskin papa. Jadi, setiap rumah tangga yang pengeluaran per kapita tahunannya di atas garis kemiskinan maka dianggap tidak miskin. Tabel 1 merangkum aturan dan kategori keputusan tentang pengukuran kemiskinan.

Tabel 1.

Kategori Kemiskinan

Aturan Keputusan	Kategori Kemiskinan
Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Tahunan $\leq$ Tingkat Kemiskinan pangan	Kategori Sangat Miskin
Garis Kemiskinan Pangan $<$ Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Tahunan $\leq$ Garis Kemiskinan paling rendah	Rentan Miskin

Garis Kemiskinan paling Bawah <Pengeluaran
Konsumsi Cukup Miskin
Per Kapita Tahunan $\leq$ Garis Kemiskinan paling
tinggi

Sumber: Laporan Penelitian InM untuk IDB (2015)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis logistik serta ingin melihat apakah Qard-Al-Hasan telah berdampak pada masyarakat khususnya rumah tangga dalam hal mengurangi angka kemiskinan. Regresi logistik akan memunculkan hasilnya (apakah masuk dalam kategori miskin atau tidak) berdasarkan karakteristik individu, seperti menerima layanan Qard-Al-Hasan serta karakteristik sosial ekonomi lainnya. Karena secara kebetulan itu dapat diterima oleh akal, apa yang sebenarnya akan ditampilkan adalah logaritma peluang yang diberikan oleh:

$$\text{Log} \left(\frac{P}{1-P} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k \quad (2.2)$$

di mana P menunjukkan kepastian suatu peristiwa atau hasil (misalnya, miskin atau tidak miskin), dan β_i adalah koefisien regresi yang terkait dengan kelompok referensi dan variabel penjelas X_i . Penting untuk disebutkan bahwa dalam studi ini peneliti hanya menganggap rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin adalah jika berada di bawah garis kemiskinan

pangan yang lebih rendah, yaitu masyarakat miskin yang sangat rentan/miskin papa dan sangat miskin, yang mana sisa rumah tangga lainnya dianggap tidak miskin. Dalam kasus ini, model logistik akan menjadi sebagai berikut:

$$\text{Logit } (P(X_{ij})) = \text{Log}(P(S_{ij})/(1-P(S_{ij}))) = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(Y_{ij}) + \beta_2 Z_{ij} + \varepsilon_{sij} \quad (2.3)$$

Dimana

Logit (P (X_{ij})) = log rasio yang ganjil dari status kemiskinan (variabel dummy) dari rumah tangga i di divisi j

Y_{ij} = status program (variabel dummy) rumah tangga i di divisi j

Z_{ij} = vektor karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga, seperti pekerjaan kepala rumah tangga (variabel dummy), pendidikan, akses rumah tangga terhadap listrik dan pipa sumur (variabel dummy), dan kepemilikan rumah tangga atas tanah dan aset keuangan.

ε_{sij} = kesalahan nonsistematik, merefleksikan, dalam bagian, penentu X_{ij} yang tidak terukur yang bervariasi antar rumah tangga.

IV. HASIL DAN ANALISA

4.1 Hasil

4.4.1. Kasus Kemiskinan

Tabel 2 menunjukkan persentase rumah tangga yang diperkirakan masuk dalam kategori miskin di wilayah barat daya Bangladesh, yaitu delapan kabupaten. Terdapat sekitar 29 persen rumah tangga yang diteliti tersebut sangat miskin. Rumah tangga ini pada dasarnya berada di bawah garis kemiskinan pangan. Kategori yang rentan dan cukup miskin menunjukkan intensitas kemiskinan rumah tangga. Peneliti menganggap orang miskin yang rentan adalah rumah tangga yang berada di bawah atau sama dengan garis kemiskinan yang lebih rendah, tetapi di atas garis kemiskinan pangan. Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga miskin yang rentan adalah 29 persen dari total sampel. Ini berarti mereka yang sangat miskin dan sangat rentan miskin merupakan hampir 60 persen dari total rumah tangga yang patut diperhatikan dari wilayah ini. Wilayah ini telah menanggung beban terbesar dari dua topan berturut-turut, SIDR dan Aila dan rumah tangga telah menderita kerugian yang sangat besar terhadap aset dan juga pendapatan. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat persentase yang tinggi dari kaum yang sangat miskin dan rentan dalam sampel penelitian ini.

Yang cukup miskin adalah rumah tangga yang mengaku berada di bawah garis kemiskinan tetapi sebenarnya berada di bagian atas garis kemiskinan. Dari analisis, rumah tangga ini

merupakan 10 persen dari total sampel. Kategori terakhir adalah tidak miskin. Perhitungan kemiskinan menunjukkan bahwa sampel tersebut mencakup hampir 32 persen rumah tangga yang memiliki kategori tidak miskin di delapan kabupaten.

Untuk mempertimbangkan dampak dari program tersebut, penting untuk mengamati tingkat kemiskinan berdasarkan wilayah program dan juga wilayah kontrol dalam penelitian ini. Meskipun dampaknya tidak akan berubah-ubah dari analisis cross-section, maka perlu dipertimbangkan untuk setiap kemajuan yang dibuat. Dalam Tabel 2, peneliti juga telah membandingkan jumlah kepala daerah kategori miskin dari program tersebut dengan daerah kontrolnya.

Tabel 2
Persentase Rumah Tangga Yang Berhubungan Dengan Garis Kemiskinan (Kategori)

	Sangat Miskin	Rentan Miskin	Cukup Miskin	Tidak Miskin
Jumlah (n=1597)	28.87	29.30	9,58	32,25
Program (n= 1199)	27.20	28,61	9,58	34,61
Kontrol (n= 398)	34,42	31,41	9,04	25,13
Perbedaan derived from uji-t	-7,39 [”]	-2,79	0,71	9,49 ^{””}

Sumber : Perhitungan penulis

Jelas terlihat bahwa persentase keluarga kategori sangat miskin menurun hampir 7 poin persentase untuk kelompok program dibandingkan dengan kelompok kontrol, dan uji-t juga menunjukkan bahwa perbedaannya cukup signifikan. Selain itu, peneliti juga telah mengamati tren yang sama terhadap rumah tangga yang rentan miskin. Persentase orang miskin yang rentan adalah 3 poin persentase lebih rendah untuk kelompok program dibandingkan dengan kelompok kontrol. Di sisi lain, rumah tangga tidak miskin telah meningkat secara signifikan sebesar 9 poin persentase untuk area program. Persentase yang cukup miskin adalah serupa dengan presentase program dan kontrol. Salah satu alasan ditentukannya lebih banyak rumah tangga yang tergolong tidak miskin di wilayah program tersebut mungkin karena mereka memiliki pendapatan lebih tinggi, sehingga mereka telah berhasil melewati garis kemiskinan.

4.1.2. Karakteristik Rumah Tangga dalam kategori Kemiskinan dan Status Program

Sejauh ini — peneliti telah mengamati status kemiskinan rumah tangga di wilayah program dan kontrol sampel pada penelitian ini. Namun, untuk kepentingan kebijakan suatu analisis, sangat penting untuk mengetahui siapa orang miskin tersebut. Apa karakteristik mereka? Bagaimana pola pengeluaran mereka? Apakah mereka mempunyai tabungan? Tingkat aset apa yang mereka miliki? Tabel 3 menunjukkan pendapatan rata-rata, pengeluaran, tingkat aset dan tabungan untuk rumah tangga miskin

di wilayah program dan kontrol penelitian ini, juga termasuk beberapa karakteristik dasar rumah tangga.

Table 3
Karakteristik Rumah Tangga Dalam Kategori Status Kemiskinan

	Program (N=1199)			Kontrol (N=398)		
	HH dibawah FPL	HH dibawah LPL	HH dibawah UPL	HH dibawah FPL	HH dibawah LPL	HH dibawah UPL
Total Pendapatan (Taka)	90.85	101.23	105.40	78.36	86.25	89.58
Anggaran Pangan (Taka)	38.48	42.89	44.37	35.22	40.41	41.42
Anggaran non-Pangan (Taka)	15.56	20.20	21.36	14.91	19.20	20.24
Total Pengeluaran (Taka)	55.04	63.09	65.73	50.13	59.61	61.66
Kepala Keluarga Adalah Wanita	5.61	5.42	5.76	11.68	7.63	7.38
Usia Kepala Keluarga (Tahun)	44.74	44.37	44.68	45.72	45.53	45.68
Pendidikan Kepala Keluarga (Tahun)	3.93	4.06	4.10	2.79	3.17	3.37
Pekerjaan Tetap Kepala Keluarga	42.68	38.70	38.03	45.26	43.51	42.62

Adalah Buruh Upah						
HH Pekerjaan Tetap Kepala Keluarga Adalah Wiraswasta (pertanian)	14.68	14.91	14.98	10.95	16.41	17.79
Pekerjaan Tetap Kepala Keluarga Adalah Wiraswasta (Non-Pertanian)	33.64	38.86	39.31	27.01	27.10	27.18
Kepala Keluarga Yang Memiliki Banyak Penghasilan Dari Berbagai Sumber	15.89	20.48	25.45	17.93	22.52	24.83
Jumlah Tanah (Desimal)	18.23	24.9	25.5	17.3	29.55	32.53
Aset Fisik Tanpa Tanah	70.41	93.3	97.9	55.0	77.32	84.71
Aset Keuangan (Taka)	3.20	5.98	6.95	1.75	4.78	6.79
Total aset	357.63	467.44	490.54	316.17	481.45	521.25

Analisis di atas menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di wilayah kontrol memiliki pendapatan, pengeluaran, aset tabungan fisik (tanpa tanah) yang lebih rendah daripada di wilayah program, terlepas dari status kemiskinan mereka. Selain itu, rumah tangga yang sangat miskin (rumah tangga kategori miskin atau sederajat dengan garis kemiskinan pangan) memiliki pendapatan, pengeluaran, aset, dan tabungan terendah dibandingkan dengan dua kelompok lainnya. Perbedaan dalam beberapa indikator tersebut dianggap kurang signifikan saat membandingkan antara rumah tangga yang masuk kategori miskin dengan mereka yang berada kategori hampir miskin.

Peneliti juga mengamati kepala keluarga yang sangat miskin juga kurang berpendidikan dibandingkan dengan rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan (kategori miskin) dan diatas garis kemiskinan (hampir miskin). Rata-rata tahun pendidikan kepala rumah tangga adalah sekitar 3 tahun, sedangkan untuk dua kelompok lainnya adalah 4 tahun. Selain itu, kepala rumah tangga ini sebagian besar merupakan pencari nafkah. Lebih dari 40 persen kepala rumah tangga yang sangat miskin menerima upah sebagai pekerjaan utama mereka. Selain itu, kepala rumah tangga yang sangat miskin memiliki persentase terendah dari berbagai sumber pendapatan. Analisis menunjukkan bahwa hanya sekitar 15 persen kepala rumah tangga yang sangat miskin memiliki banyak sumber penghasilan, sedangkan di dua kelompok lainnya lebih dari 20 persen kepala rumah tangga memiliki banyak

sumber penghasilan. Penting untuk diketahui bahwa 25 persen kepala rumah tangga yang hidup sederajat dengan kategori diatas garis kemiskinan memiliki banyak sumber penghasilan di wilayah kontrol.

Adapun yang harus dipaparkan adalah perbedaan antara anggaran makanan dengan yang bukan makanan relatif lebih tinggi bagi kelompok yang hidup miskin dan sulit akan kebutuhan pangan dibandingkan dengan dua kelompok lainnya. Karena itu, kita dapat mengatakan bahwa rumah tangga yang sangat miskin mempunyai anggaran pengeluaran lebih banyak untuk makanan daripada barang yang bukan makanan. Di wilayah program tersebut, persentase rumah tangga yang dikepalai oleh wanita semuanya miskin, sekitar 5 persen. Namun, di wilayah kontrol persentase rumah tangga yang dikepalai wanita adalah yang tertinggi dalam kategori sangat miskin, yaitu sekitar 12 persen. Mengenai aset, rumah tangga yang sangat miskin memiliki rata-rata aset fisik (tanpa tanah) dari Tk. 70.000, sedangkan rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan dan hampir miskin memiliki aset fisik senilai Tk. 93.000 dan Tk. 97.000 secara berturut-turut. Selain itu, rumah tangga yang sangat miskin memiliki akumulasi tanah lebih sedikit daripada dua kelompok lainnya.

Hasil dari temuan diatas menunjukkan bahwa semakin miskin rumah tangga, semakin rendah pendapatan, pengeluaran, dan akumulasi aset. Selain itu, penerima upah yang termasuk dalam kategori miskin yaitu bukan wiraswasta. Rumah tangga yang

dikepalai wanita dan yang berpendidikan lebih rendah cenderung tergolong miskin. Temuan penting lainnya adalah bahwa kelompok kontrol memiliki jumlah rumah tangga yang lebih banyak dengan pendapatan yang lebih rendah, aset yang lebih rendah, kualifikasi pendidikan kepala rumah tangga yang lebih rendah, jumlah rumah tangga yang memiliki lebih banyak penghasilan, dan lebih banyak penghasil upah dan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang bergabung meminjam dana non-bunga di layanan FKW lebih baik daripada rumah tangga yang tidak menerima pinjaman dari lembaga tersebut. Pada bagian berikut, peneliti akan mengkaji kekuatan hipotesis ini melalui uji-t dan regresi logistik.

4.2 Uji kekuatan hipotesis

4.2.1 Perbedaan Karakteristik Sosial-Ekonomi Program dan Kelompok Kontrol: Sampel T-Test Independen

Dari pemaparan di atas, peneliti telah mengamati beberapa karakteristik dari orang miskin. Tetapi apakah karakteristik ini berbeda secara statistik antara program dan kelompok kontrol? Dengan mengacu pada Tabel x, peneliti memiliki beberapa indikator bahwa karakteristik kelompok program lebih baik daripada kelompok kontrol di bidang sosial ekonomi. Namun, kita perlu memastikan bahwa apakah hasil ini kuat. Tabel 4 menunjukkan hasil uji-t sampel independen untuk mengamati apakah karakteristik utama orang miskin berbeda secara signifikan

antara kedua kelompok. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok program memiliki pendapatan yang secara signifikan lebih tinggi, pengeluaran makanan, dan non-pangan yang lebih tinggi, serta memiliki kepala keluarga yang lebih berpendidikan dan lebih sedikit sebagai penerima upah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor ini mungkin memiliki pengaruh pada kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti mendapati secara signifikan bahwa lebih sedikit kategori orang miskin dalam kelompok program tersebut.

Tabel 4
T-Test Karakteristik Sosial-Ekonomi Program dan Kelompok Kontrol

	Program (N=1199)	Kontrol (N=398)	Perbedaan t-test
Total pendapatan (Taka in 1000s)	121.0	101.7	20.53**
Anggaran Pangan (Taka in 1000s)	48.93	45.08	3.85***
Anggaran non-Pangan (Taka in 1000s)	30.29	27.24	3.05**
Pendidikan kepala keluarga (tahun)	4.75	3.79	.95***
Pekerjaan	30.5	39.44	8.92***

tetap kepala keluarga adalah buruh upah (%)			
Keluarga kategori miskin (%)	65.38	74.87	9.48***

Sumber: survei lapangan

4.2.2 Efektivitas FKW dalam Mengurangi angka Kemiskinan: Analisis Logistik

Pada bagian sebelumnya peneliti telah mengamati bahwa kelompok program (kelompok yang menerima Qard-Al-Hasan) memiliki lebih sedikit rumah tangga yang miskin daripada kelompok kontrol (kelompok yang tidak menerima Qard-Al-Hasan) dan lebih baik daripada kelompok kontrol di sektor pokok sosial-ekonomi. Namun, hasil di atas tidak akurat bahwa apakah kemiskinan berpengaruh pada karakteristik sosial-ekonomi tersebut. Selain itu, mereka tidak menunjukkan apakah FKW memiliki dampak yang signifikan terhadap status kemiskinan penerima manfaat. Jika demikian, pada tingkat apa?. Oleh karena itu, analisis ekonometrik penting untuk mengamati seberapa kuat kontribusi FKW untuk mengurangi status kemiskinan penerima manfaat. Selain itu, peneliti menguji seberapa cocok model logistik tersebut dengan data uji chi-square Hosmer dan Lemeshow dibandingkan dengan data uji chi-square. Dapat disimpulkan bahwa

model chi-square Hosmer dan Lemeshow itu tidak signifikan yang menunjukkan bahwa estimasi tersebut adalah sesuai dengan data. Selain itu, hasil uji chi-square adalah signifikan, yang menunjukkan bahwa semua variabel independen yang termasuk dalam model logistik meningkatkan kelayakannya.

Analisis logistik pada Tabel 5 menegaskan bahwa kemungkinan besar peserta FKW masuk dalam kategori miskin adalah sekitar 1,46 kali lebih rendah daripada yang bukan peserta, dengan hasil yang signifikan pada tingkat 5%. Ini menunjukkan bahwa program Qard Al-Hassan memiliki dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan, seperti pada awalnya (sebelum dimulainya program) karakteristik sosial ekonomi serupa untuk kedua kelompok (program dan kontrol). Jika kita menganalisis lebih lanjut karakteristik orang miskin, kita menemukan bahwa rumah tangga miskin memiliki tabungan yang lebih rendah, pendidikan yang lebih rendah, kepemilikan tanah yang lebih rendah, dan ukuran rumah tangga yang lebih tinggi daripada rumah tangga yang tidak miskin. Oleh karena itu, kita dapat berargumen bahwa rumah tangga miskin tidak hanya kekurangan modal fisik, tetapi mereka juga kekurangan modal sumber daya manusia. Peneliti juga menemukan bahwa jika kepala rumah tangga adalah pencari nafkah, maka kemungkinan besar rumah tangga tersebut miskin adalah 1,43 kali lebih tinggi daripada kepala rumah tangga wiraswasta. Selain itu, kepala rumah tangga dengan banyak sumber penghasilan memiliki kemungkinan 1,3 kali lebih rendah untuk

menjadi miskin. Analisis logit juga menunjukkan bahwa rumah tangga dengan akses listrik dan akses air pipa memiliki kemungkinan hampir dua kali lebih rendah untuk menjadi miskin daripada mereka yang tidak memiliki akses. Penting untuk disebutkan bahwa seperti ditunjukkan pada Tabel 3, bahwa peserta FKW lebih baik daripada bukan peserta dalam hal indikator yang disebutkan di atas, terlepas dari status kemiskinan mereka. Ini menunjukkan bahwa program tersebut juga dapat memiliki dampak yang efektif pada akumulasi aset fisik dan keuangan dan modal manusia dan dalam mencapai standar kehidupan yang lebih baik.

Tabel 5
Dampak FKW terhadap Pengurangan angka Kemiskinan
(Regresi Logistik)

VARIABEL	Jika keluarga di bawah atau sederajat dengan yang lebih rendah poverty line	Standar kesalahan
Odds Ratio		
Peserta program FKW	.6829893**	.0961643
Tabungan keluarga	.9773638***	.0032585
Kepemilikan tanah keluarga	.9964389***	.000978
Ukuran keluarga	1.864107***	.0945782
Tahun pendidikan kepala keluarga	.9615045***	.0151876

Jika kepala keluarga adalah buruh upah	1.439023***	.2047532
Jika kepala keluarga memiliki penghasilan dari banyak sumber	.7530676**	.1137501
Jika keluarga memiliki akses listrik	.5230643***	.0800768
jika keluarga memiliki akses pipa air	.4975234***	.1448416
Konstan	.7568812	0.421
Hosmer-Lemeshow chi2	9.50	0.3018 (sig.level)
Pearson chi2	1709.25	0.0106*** (sig.level)
Observations	1,594	

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Source: Field Survey (2015)

4.3 Analisis

Hasil di atas menunjukkan bahwa program FKW memiliki dampak yang signifikan pada pengentasan tingkat kemiskinan di daerah rawan bencana, Bangladesh. Analisis logit menemukan bahwa penerima Qard-Al-Hasan adalah 1,46 kali lebih kecil kemungkinannya menjadi miskin daripada yang bukan penerima. Hal ini diharapkan bahwa gambaran program FKW dalam menawarkan pinjaman tanpa bunga dan kemungkinan besar tanpa

adanya beban pembayaran bunga kepada penerima, menjadikan pendapatan keluarga program tersebut akan lebih tinggi daripada keluarga kontrol. Pendapatan yang lebih tinggi ini juga memungkinkan mereka untuk memiliki pengeluaran lebih banyak atas barang apa saja yang mereka perlukan. Ini juga membantu mereka keluar dari zona kemiskinan. Penting untuk diketahui bahwa penerima manfaat program FKW memiliki pendapatan dan pengeluaran yang jauh lebih tinggi daripada yang bukan penerima manfaat layanan tersebut.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farooqi et al. (2017) di Bangladesh, Iqbal dan Shafiq (2015) di Pakistan, dan Effendi (2013) di Indonesia. Farooqi et al. (2017) yang melakukan penelitian terhadap 700 wanita di Bangladesh dan menemukan pengaruh positif dan hasilnya signifikan dari pendapatan bulanan kotor peminjam. Iqbal dan Shafiq (2015) mengkaji program AKHUWAT sebagai studi kasus Qard-Al-Hasan dan hasil dari penelitian tersebut adalah berhasil meningkatkan standar hidup penerima manfaatnya dengan mengubah mereka menjadi donor. Effendi (2013) melakukan analisis kualitatif tentang peran keuangan mikro Islam dalam pengentasan kemiskinan, menemukan bahwa keuangan mikro Islam lebih berhasil daripada keuangan mikro konvensional dalam mengurangi kemiskinan karena pilihan pembiayaan tanpa bunga dan rencana pembayaran yang lebih fleksibel.

Namun, temuan peneliti berbeda dengan temuan Widiyanto et al. (2011), yang melakukan studi tentang kinerja bisnis dari 84 penerima bisnis Qard-Al-Hasan dan dampaknya menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Mereka menemukan bahwa tidak ada dampak pada kinerja bisnis, karena pembiayaan awal Qard-Al-Hasan terlalu rendah untuk berdampak pada kinerja bisnis, dan karenanya dampak pembiayaan tidak terlihat. Namun, hasil dari penelitian tersebut adalah pendapatan dan laba bisnis meningkat secara signifikan ketika membandingkan pengusaha yang menerima pembiayaan Qard-Al-Hasan untuk pertama kalinya (kondisi awal) dan dalam kondisi ketika penelitian dilakukan (kondisi kedua). Mereka berargumen bahwa Qard-Al-Hasan berkontribusi pada manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, karena para peserta bersedia membayar zakat dan infaq. Salah satu perbedaan penting antara penelitian peneliti dan penelitian Widiyanto et al. (2011) adalah ukuran sampel, karakteristik sampel dan metodologi. Studi ini membandingkan temuan penerima Qard-Al-Hasan dan non-penerima, tidak hanya membandingkan situasi sebelum dan sesudah. Selain itu, sampel pada penelitian ini terdiri dari 1600 keluarga yang pada dasarnya sangat miskin dan disita di daerah rawan bencana. Bagi mereka, akses ke pinjaman tanpa bunga kecil akan memiliki dampak yang lebih besar pada pengurangan kemiskinan, karena menanggung biaya dana dapat membebani mereka. Di sisi lain, studi Widiyanto et al. (2011) mengevaluasi keluarga yang relatif lebih makmur yang terlibat

dalam kegiatan bisnis dan membutuhkan pinjaman besar, yang akan memiliki dampak signifikan pada aktivitas bisnis mereka dan dengan demikian dapat mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, hasil dari dua studi tersebut jelas berbeda.

Meskipun temuan penelitian ini serupa dengan banyak studi keuangan mikro Islam lainnya, penelitian ini memberikan kontribusi unik yang berbeda dari yang lain dengan menjelaskan peran Qard-Al-Hasan dalam memberantas angka kemiskinan melalui beberapa cara. Pertama, penelitian ini memiliki jumlah sampel yang besar dari setiap keluarga (rumah tangga) yang diteliti, yang kemudian mampu menciptakan landasan kuat untuk memperoleh hasil yang akurat. Kedua, penelitian ini melihat keefektifan Qard-Al-Hasan pada sampel yang telah berhasil bangkit dari dampak bencana yang parah, karena program tersebut berfungsi sebagai layanan cepat tanggap dalam membantu kebutuhan pokok mendesak kepada para korban bencana. Oleh karena itu, para penerima layanan tersebut sudah sangat rentan dengan kemiskinannya karena mereka sudah sering menghadapi bencana alam yang parah. Ini menyiratkan bahwa jika program ini terbukti memiliki dampak positif pada mata pencaharian pada setiap keluarga tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Qard-Al-Hasan tidak hanya sangat efektif dalam memperbaiki situasi rumah tangga kaum miskin saja, tetapi juga memainkan peran pentingnya dalam mengangkat derajat masyarakat miskin dari kalangan paling bawah berdasarkan segmen dasar piramida. Studi ini telah

memberikan kontribusi yang sangat menarik dengan menunjukkan keefektivitas Qard-Al-Hassan. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil dibuktikan dengan hasil yang akurat pula yang bahwasanya Qard-Al-Hassan telah memainkan peran penting dalam meningkatkan derajat kehidupan masyarakat yang lebih baik tidak hanya pada orang miskin, tetapi juga pada yang termiskin dari yang miskin.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

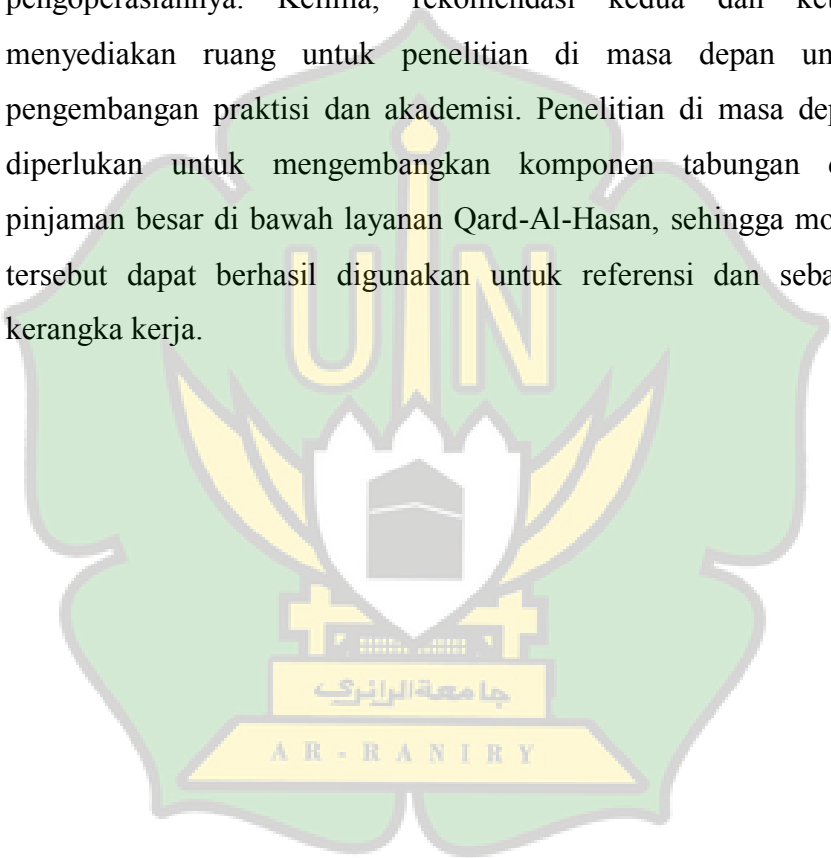
Penelitian ini membahas tentang keefektivitas program FKW, layanan Qard-al-Hassan (pinjaman baik tanpa bunga) yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan para responden yang diteliti di Bangladesh. Hasilnya menunjukkan bahwa program tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang memanfaatkan layanan program tersebut dibandingkan dengan daerah kontrolnya yang tidak. Terdapat 27 persen rumah tangga (keluarga) yang sangat miskin di wilayah program tersebut dibandingkan dengan 34 persen rumah tangga lainnya di daerah kontrol dengan hasil yang dinilai signifikan secara statistik. Analisis logistik menegaskan bahwa kemungkinan besar peserta FKW yang masuk kategori miskin adalah sekitar 1,46 kali lebih rendah daripada yang bukan peserta, dengan hasil yang signifikan di tingkatan 5%. Ini menunjukkan bahwa program tersebut

memiliki dampak positif dalam mengatasi tingkat kemiskinan, tentunya tidak seperti keadaan sebelum dimulainya program, dimana kehidupan sosial ekonomi relatif serupa dan belum adanya peningkatan bagi kedua kelompok (program dan kontrol) tersebut. Temuan ini juga menunjukkan bahwa peserta FKW lebih baik daripada rumah tangga (keluarga) yang menjadi kontrol pada penelitian ini. Mereka memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan kemampuan yang lebih baik untuk membeli lebih banyak kebutuhan pangan maupun non-pangan. Disamping itu, FKW menawarkan pinjaman tanpa bunga sehingga biaya pinjaman menjadi jauh lebih rendah dan karenanya orang dapat mengakumulasi lebih banyak aset, yang mungkin saja dapat membantu mereka dalam meningkatkan status ekonomi mereka setelah terjadinya bencana angin topan. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa peserta program FKW memiliki aset keuangan yang lebih besar daripada yang bukan peserta. Melalui layanan Qard-Al-Hasan, masyarakat atau keluarga yang telah memanfaatkan jasa tersebut dapat meningkatkan status sosial-ekonomi yang lebih baik serta meningkat daripada yang tidak menggunakan layanan tersebut. Program ini terbukti efektif dan telah berkontribusi baik dalam hal pengurangan angka kemiskinan serta mengangkat derajat kaum miskin menuju ekonomi yang lebih baik di Bangladesh dari segmen paling bawah dari dasar piramida.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini sangat direkomendasikan untuk dikembangkan kembali oleh para praktisi, regulator, dan juga peneliti lainnya di masa yang akan datang. Pertama, mempertimbangkan keefektifan Qard-Al-Hasan dalam pengurangan angka kemiskinan, para praktisi harus turut berupaya dalam memperkenalkan layanan tersebut di kalangan masyarakat. Bahkan praktisi keuangan mikro tradisional pun dapat mengembangkan komponen Qard-Al-Hasan bersama dengan program kredit tradisional mereka. Kedua, temuan ini juga menunjukkan bahwa tabungan dapat secara signifikan mempengaruhi pengurangan tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu, Qard-Al-Hasan dapat diikat walau hanya dengan sedikit tabungan. Akumulasi tabungan dari waktu ke waktu tidak hanya akan meningkatkan kemampuan meminjam bagi rumah tangga (keluarga) untuk berinvestasi, tetapi juga akan mengurangi ketergantungan mereka pada dana pinjaman, juga bertindak sebagai asuransi terhadap kerugian rentan di masa depan dalam bidang ekonomi. Dengan cara ini, tingkat standar juga dapat diminimalkan. Ketiga, ukuran pinjaman di bawah Qard-Al-Hasan biasanya kecil. Mengingat dampaknya pada pengurangan angka kemiskinan, maka besarnya pinjaman dapat pula ditingkatkan. Ukuran pinjaman yang lebih besar untuk peminjam yang giat akan sukses bangkit dari zona kemiskinan. Keempat, rekomendasi ketiga memiliki implikasi penting bagi regulator, yang mana harus memberikan insentif kepada penyedia Qard-Al-Hasan untuk

menawarkan pinjaman yang lebih besar. Mereka dapat menetapkan tingkat minimum untuk memberikan sejumlah pinjaman kepada pengusaha. Mereka juga dapat mempromosikan pelembagaan Qard-Al-Hasan, karena masih bersifat informal dalam pengoperasiannya. Kelima, rekomendasi kedua dan ketiga menyediakan ruang untuk penelitian di masa depan untuk pengembangan praktisi dan akademisi. Penelitian di masa depan diperlukan untuk mengembangkan komponen tabungan dan pinjaman besar di bawah layanan Qard-Al-Hasan, sehingga model tersebut dapat berhasil digunakan untuk referensi dan sebagai kerangka kerja.



Referensi

- Ali, A. Y. (1989). The Holy Quran: Text, Translation, and Commentary. Maryland: Amana Corporation.
- Ali, A. (1999). Climate change impacts and adaptation assessment in Bangladesh, *Climate Research*, 12, 109-116.
- Aslam Haneef, M., Pramanik, A. H., Mohamed, M. O., Muhammad, A. D., & Amin, F. M. (2015). Integration of Waqf and Islamic microfinance for poverty reduction: Case studies of Malaysia, Indonesia and Bangladesh. The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC).
- Banerjee, A. V. & Duflo, E. (2011). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs.
- Effendi, J. (2013). The role of Islamic microfinance in poverty alleviation and environmental awareness in Pasuruan, East Java, Indonesia: A comparative study. Universitätsverlag Göttingen.
- Farooq, M.O. & El Ghattis, N. (2015). Qard Hasan, Credit Cards and Islamic Financial Product Structuring: Some Qur'anic and Practical Considerations. *Journal of Islamic Financial Studies*, 1(1), 1-21.
- Farooqi, A. H., Qamar, M. U. R., & Chachi, A. (2017). Role of Islamic Microfinance Scheme in Poverty Alleviation and

Well-Being of Women Implemented by Islami Bank Bangladesh Limited. *İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD)*, 3(1), 1-32.

Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on poverty and inequality*. Washington: World Bank.

IFRC (2013), *Emergency Appeal Six-Month Consolidated Report – Bangladesh: Tropical Cyclone Mahasen*.

Institute for Inclusive Finance and Development (InM) (2016), *Impact Assessment Study of the FKW Rehabilitation and Livelihood Program and Implementing NGOs*, Final Report prepared for Islamic Development Bank. Dhaka: InM.

Iqbal, Z., & Shafiq, B. (2015). Islamic finance and the role of Qard-al-Hassan (Benevolent Loans) in enhancing inclusion: a case study of AKHUWAT. *ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives*, 4(4), 23-40.

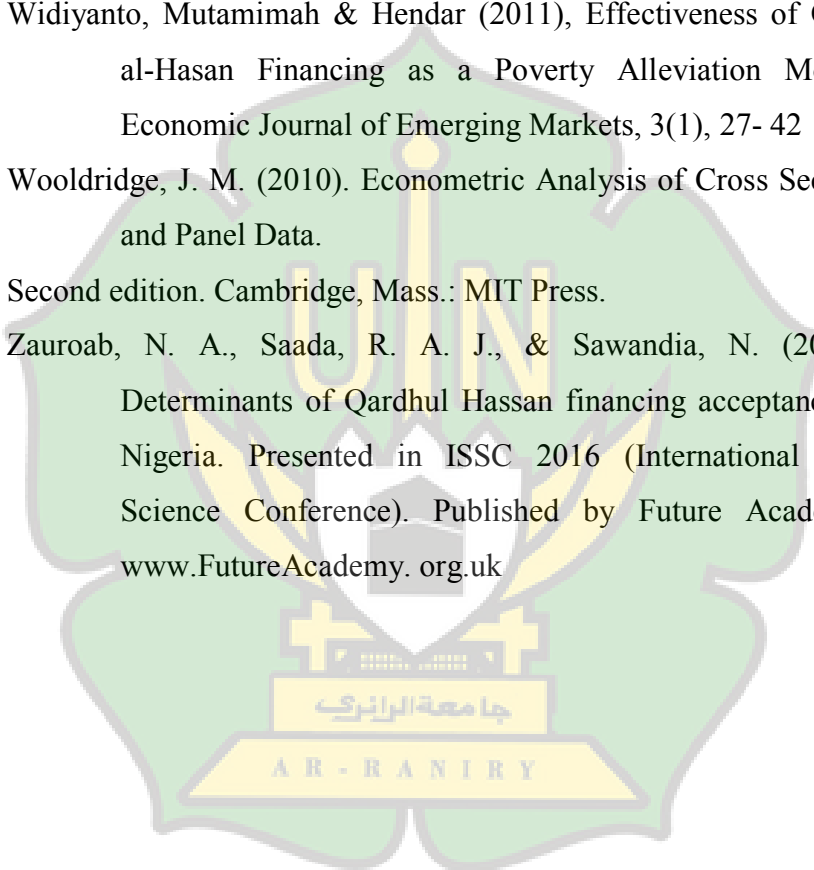
Izadyar, A. B., Ragnath, F., & Özdemir, M. (2014). A New Perspective of Benevolent Loan, Qard Al-Hassan, Using Upfront Payment ‘Mesbah Point’. *Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 199-217.

Mohieldin, M., Iqbal, Z. Rostom, A., & Fu, X. (2011). *The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in OIC Countries*. Presented at the 8th International Conference on Islamic Economics and Finance. Qatar: Center for

Islamic Economic and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation

- Mansori, S., Chin, S. K., & Safari, M. (2015). A shariah perspective review on Islamic microfinance. *Asian Social Science*, 11(9), 273-280.
- MoEF (2008), Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, Dhaka: Ministry of Environment and Forests, Government of Bangladesh.
- Mojtahed, A., & Hassanzadeh, A. (2009). The Evaluation of Qard-al-Hasan as a Microfinance Approach in Poverty Alleviation Programs, 1–32.
- Obaidullah, M and Khan, T (2008), Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiative, IRTI-IDB, Jeddah
- Oyesanyaa, O.S. & Salako, T.A. (2019). A Sharī‘Ah Assessment of Al-Qard Al- Hasan (Ethical Loan) and Its Impact in Al-Hayat Relief Foundation, Ogun State, Nigeria. *Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, 18, 40-59
- Paul, B. K. (2009). Why relatively fewer people died? The case of Bangladesh’s Cyclone Sidr. *Natural Hazards*, 50(2), 289-304.
- Rokhman, W. (2013). Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) and Poverty Empowerment.
- Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS), 1(2): 181-195

- Shamsuddoha, M., & Chowdhury, R. K. (2007). Climate change impact and disaster vulnerabilities in the coastal areas of Bangladesh. COAST Trust, Dhaka.
- Widiyanto, Mutamimah & Hendar (2011), Effectiveness of Qard al-Hasan Financing as a Poverty Alleviation Model, *Economic Journal of Emerging Markets*, 3(1), 27- 42
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. Second edition. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Zauroab, N. A., Saada, R. A. J., & Sawandia, N. (2016). Determinants of Qardhul Hassan financing acceptance in Nigeria. Presented in ISSC 2016 (International Soft Science Conference). Published by Future Academy. www.FutureAcademy.org.uk



BAB III

RIVIEW JURNAL

Judul Jurnal : Qard Al-Hassan As A Tool For Poverty Alleviation: A Case Study Of The Fael Khair Waqf Program In Bangladesh

Tahun : 2019

Penulis : Farah Muneer & Foyasal Khan

Publikasi : *Jurnal Of Islamic Monetary Economics And Finance*

REVIEW : MARTHA PURNA SYIVA

Latar Belakang Penelitian:

Qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa Bunga yang diberikan peorangan atau lembaga kepada seseorang tanpa perlu adanya agunan. Qardhul hasan adalah salah satu layanan untuk redistribusi pendapatan dan kekayaan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu dalam Islam. Fokus dari ekonomi islam ialah mensejahterakan seluruh ummat, terutama mereka yang berada dalam garis kemiskinan. Pada tahun 2007 Bangladesh di landa angin topan SIDR sehingga menambah tingkat kesulitan ekonomi di Bangladesh. Kemudian pada tahun yang sama muncullah program Fael Khair wakaf sebagai sarana cepat tanggap untuk

menolong para korban angin topan SIDR. Program ini bertujuan untuk membantu pembangunan shelter atau tempat tinggal dan modal pembiayaan mata pencaharian kepada warga yang terdampak. Pada tahun 2015 program Fael Khair Waqf (FKW) selesai dan dituntaskan, sehingga beberapa researcher berencana ingin meneliti seberapa sukses program FKW ini dalam mengatasi kemiskinan di Bangladesh.

Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui apakah program Fael Khair Waqf menggunakan metode Qardhul Hasan berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan di Bangladesh. Sehingga diharapkan program ini nantinya dapat dimanfaatkan dalam program pengentasan kemiskinan di Negara lainnya seperti Indonesia.

Metode penelitian :

Dalam penelitian ini, pertama digunakan metode CBN (Costs Of Base Need). Metode CBN digunakan untuk menentukan golongan kemiskinan di 12 district yang terdampak angin topan SIDR. Setelah didapatkan 3 golongan garis kemiskinan, kemudian digunakanlah metode analisis regresi logistik untuk melihat pengaruh FKW terhadap kemiskinan. Apakah ada pengaruh perkembangan yang dihasilkan setelah beberapa tahun program FKW dijalankan.

Hasil Peneltian :

Hasil dari analisis logistik ditemukan bahwa orang yang masuk dalam kategori miskin dan kemungkinan besar menjadi peserta FKW adalah sekitar 1,46 kali lebih rendah dari pada non-peserta. Hal ini berarti yang non peserta Fael Khair Waqf kemungkinan lebih besar masuk dalam kategori miskin. Selain itu, layanan Qard-al-Hassan juga meringankan biaya pinjaman secara signifikan dan karenanya para peserta dapat mengakumulasi lebih banyak aset, yang mana mungkin dapat membantu mereka dalam meningkatkan status ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa efektifnya suatu program dapat dicapai dari kerjasama antara praktisi pembangunan dan juga peneliti dalam mempromosikan dan memperkenalkan sarana Qard-al-Hassan, sehingga kaum fakir miskin dapat dengan mudah memanfaatkan jasa tersebut.

Kekuatan penelitian :

Kekuatan peneltian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuisisioner sehingga cukup mudah untuk digunakan oleh subjek penelitian sehingga dalam pengambilan datanya tidak dibutuhkan waktu yang lama seperti pada metode kualitatif.

Kelemahan Penelitian :

Adanya kemungkinan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap status tingkat kemiskinan masyarakat yang belum dijabarkan dalam penelitian ini, misalnya : bantuan dari sanak saudara, mengingat kelompok yang diberikan program ialah mereka yang terdampak korban bencanabukan yang memang sudah miskin dari dulu, sehingga bisa saja masih memiliki saudara yang dapat membantu mereka sehingga menaikkan simpanan atau penghasilan dan pengeluaran pangannya.

Hubungan keterkaitan jurnal dengan Indonesia, Khususnya Aceh :

Menurut hasil data penelitian menunjukkan bahwa program FKW memiliki dampak yang signifikan pada pengentasan tingkat kemiskinan di daerah rawan bencana, Bangladesh. Analisis logistik menemukan bahwa penerima Qard-Al-Hasan adalah 1,46 kali lebih kecil kemungkinannya menjadi miskin daripada yang bukan penerima. Hal ini diharapkan bahwa gambaran program FKW dalam menawarkan pinjaman tanpa bunga dan kemungkinan besar tanpa adanya beban pembayaran bunga kepada penerima, menjadikan pendapatan keluarga program tersebut akan lebih tinggi daripada keluarga kontrol. Pendapatan yang lebih tinggi ini juga memungkinkan mereka untuk memiliki pengeluaran lebih banyak atas barang apa saja yang mereka perlukan. Ini juga

membantu mereka keluar dari zona kemiskinan. Penting untuk diketahui bahwa penerima manfaat program FKW memiliki pendapatan dan pengeluaran yang jauh lebih tinggi daripada yang bukan penerima manfaat layanan tersebut.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farooqi et al. (2017) di Bangladesh, Iqbal dan Shafiq (2015) di Pakistan, dan Effendi (2013) di Indonesia. Farooqi et al. (2017) yang melakukan penelitian terhadap 700 wanita di Bangladesh dan menemukan pengaruh positif dan hasilnya signifikan dari pendapatan bulanan kotor peminjam. Iqbal dan Shafiq (2015) mengkaji program AKHUWAT sebagai studi kasus Qard-Al-Hasan dan hasil dari penelitian tersebut adalah berhasil meningkatkan standar hidup penerima manfaatnya dengan mengubah mereka menjadi donor. Effendi (2013) melakukan analisis kualitatif tentang peran keuangan mikro Islam dalam pengentasan kemiskinan, menemukan bahwa keuangan mikro Islam lebih berhasil daripada keuangan mikro konvensional dalam mengurangi kemiskinan karena pilihan pembiayaan tanpa bunga dan rencana pembayaran yang lebih fleksibel.

Namun, temuan kami berbeda dengan temuan Widiyanto et al. (2011), yang melakukan studi tentang kinerja bisnis dari 84 penerima bisnis Qard-Al-Hasan dan dampaknya menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Mereka menemukan bahwa tidak ada dampak pada kinerja bisnis, karena pembiayaan awal Qard-Al-

Hasan terlalu rendah untuk berdampak pada kinerja bisnis, dan karenanya dampak pembiayaan tidak terlihat. Namun, hasil dari penelitian tersebut adalah pendapatan dan laba bisnis meningkat secara signifikan ketika membandingkan pengusaha yang menerima pembiayaan Qard-Al-Hasan untuk pertama kalinya (kondisi awal) dan dalam kondisi ketika penelitian dilakukan (kondisi kedua). Mereka berargumen bahwa Qard-Al-Hasan berkontribusi pada manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, karena para peserta bersedia membayar zakat dan infaq. Salah satu perbedaan penting antara penelitian kami dan penelitian Widiyanto et al. (2011) adalah ukuran sampel, karakteristik sampel dan metodologi. Studi ini membandingkan temuan penerima Qard-Al-Hasan dan non-penerima, tidak hanya membandingkan situasi sebelum dan sesudah. Selain itu, sampel pada penelitian ini terdiri dari 1600 keluarga yang pada dasarnya sangat miskin dan disita di daerah rawan bencana. Bagi mereka, akses ke pinjaman tanpa bunga kecil akan memiliki dampak yang lebih besar pada pengurangan kemiskinan, karena menanggung biaya dana dapat membebani mereka. Di sisi lain, studi Widiyanto et al. (2011) mengevaluasi keluarga yang relatif lebih makmur yang terlibat dalam kegiatan bisnis dan membutuhkan pinjaman besar, yang akan memiliki dampak signifikan pada aktivitas bisnis mereka dan dengan demikian dapat mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, hasil dari dua studi tersebut jelas berbeda.

Meskipun temuan penelitian ini serupa dengan banyak studi keuangan mikro Islam lainnya, penelitian ini memberikan kontribusi unik yang berbeda dari yang lain dengan menjelaskan peran Qard-Al-Hasan dalam memberantas angka kemiskinan melalui beberapa cara. Pertama, penelitian ini memiliki jumlah sampel yang besar dari setiap keluarga (rumah tangga) yang diteliti, yang kemudian mampu menciptakan landasan kuat untuk memperoleh hasil yang akurat. Kedua, penelitian ini melihat keefektifan Qard-Al-Hasan pada sampel yang telah berhasil bangkit dari dampak bencana yang parah, karena program tersebut berfungsi sebagai layanan cepat tanggap dalam membantu kebutuhan pokok mendesak kepada para korban bencana. Oleh karena itu, para penerima layanan tersebut sudah sangat rentan dengan kemiskinannya karena mereka sudah sering menghadapi bencana alam yang parah. Ini menyiratkan bahwa jika program ini terbukti memiliki dampak positif pada mata pencaharian pada setiap keluarga tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Qard-Al-Hasan tidak hanya sangat efektif dalam memperbaiki situasi rumah tangga kaum miskin saja, tetapi juga memainkan peran pentingnya dalam mengangkat derajat masyarakat miskin dari kalangan paling bawah berdasarkan segmen dasar piramida. Studi ini telah memberikan kontribusi yang sangat menarik dengan menunjukkan keefektivitas Qard-Al-Hassan. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil dibuktikan dengan hasil yang akurat pula yang bahwasanya Qard-Al-Hassan telah memainkan peran

penting dalam meningkatkan derajat kehidupan masyarakat yang lebih baik tidak hanya pada orang miskin, tetapi juga pada yang termiskin dari yang miskin.

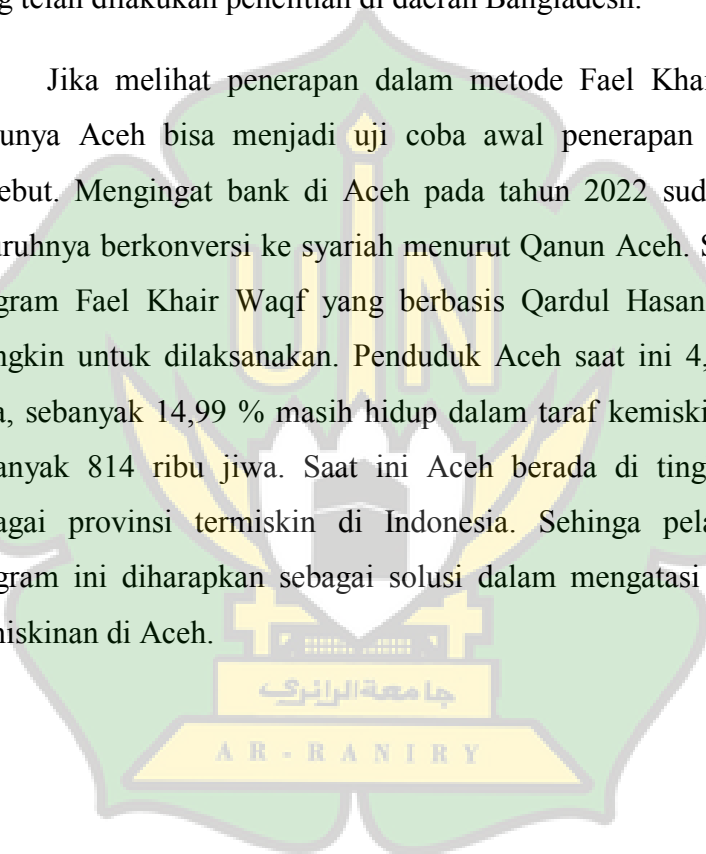
Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yaitu sebanyak 267.700.000 jiwa pada tahun 2018 dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar ini tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9,78% atau setara dengan 26,42 juta jiwa. Tentunya jumlah ini tergolong besar dan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang kaya akan hasil alamnya.

Kemiskinan bukanlah hal yang asing bagi Negara berkembang, termasuk Indonesia. Sudah seharusnya kita keluar dari masalah ini dan itu tentunya memerlukan sebuah solusi yang tepat. Program Fair Khair Waqf (FKW) yang menggunakan metode Qardul Hasan yang diterapkan di Bangladesh bisa menjadi solusi yang ditawarkan dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal ini melihat populasi muslim Indonesia yang mencapai 230 juta. Sehingga, penerapan program berbasis Qardul-Hasan agar lebih mudah untuk dilaksanakan, selain untuk mengurangi penggunaan riba yang ditawarkan lembaga konvensional dan juga tentunya bisa menjadi solusi mengurangi angka kemiskinan.

Penggunaan metode Qardul Hasan ini diharapkan untuk mengurangi penggunaan pembiayaan konsumtif, sehingga

pembiayaan yang diberikan akan lebih berdampak jangka panjang. Pembiayaan yang diberikan lebih ke arah produktif sehingga masyarakat dapat menggunakannya sebagai modal usaha. Dengan cara diharapkan taraf kemiskinan Indonesia dapat berkurang seperti yang telah dilakukan penelitian di daerah Bangladesh.

Jika melihat penerapan dalam metode Fael Khair Waqf, tentunya Aceh bisa menjadi uji coba awal penerapan program tersebut. Mengingat bank di Aceh pada tahun 2022 sudah harus seluruhnya berkonversi ke syariah menurut Qanun Aceh. Sehingga program Fael Khair Waqf yang berbasis Qardul Hasan sangat mungkin untuk dilaksanakan. Penduduk Aceh saat ini 4,732 juta jiwa, sebanyak 14,99 % masih hidup dalam taraf kemiskinan atau sebanyak 814 ribu jiwa. Saat ini Aceh berada di tingkat ke-7 sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Sehingga pelaksanaan program ini diharapkan sebagai solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan di Aceh.



Daftar Pustaka

- Effendi, J. (2013). *The role of Islamic microfinance in poverty alleviation and environmental awareness in Pasuruan, East Java, Indonesia: A comparative study*. Universitätsverlag Göttingen.
- Farah, M., & Foyassal, K, (2019). Qard Al-Hassan As A Tool For Poverty Alleviation: A Case Study Of The Fael Khair Waqf Program In Bangladesh, *Jurnal of Islamic economics and finance*, vol. 5, No.4 829-848
- Iqbal, Z., & Shafiq, B. (2015). Islamic finance and the role of Qard-al-Hassan (Benevolent Loans) in enhancing inclusion: a case study of AKHUWAT. *ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives*, 4(4), 23-40.
- Widiyanto, Mutamimah & Hendar (2011), Effectiveness of Qard al-Hasan Financing as a Poverty Alleviation Model, *Economic Journal Of Emerging Markets*, 3(1), 27- 42